



KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Arah Kebijakan Kemendag 2011 

Bappebti Bangun 15

Gudang SRG 

BKDI Luncurkan

Transaksi PALN 

JFX RAMU KONTRAK SYARIAH



DARI REDAKSI

Industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia di tahun 2011 agaknya akan mengalami pertumbuhan yang demikian pesat dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan Bappebti, pertumbuhan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia tahun 2010 mengalami kenaikan sekitar 26,21 % dari tahun 2009. Kenaikan pertumbuhan itu antara lain disebabkan adanya kontribusi yang signifikan dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Untuk tahun 2011, pertumbuhan industri perdagangan berjangka diharapkan bisa mencapai 40 % dari tahun 2010. Dengan asumsi, Jakarta Future Exchange (JFX) didukung perangkat perdagangan yang lebih mumpuni sehingga pelaku pasar bisa lebih maksimal memenuhi target 5 % perdagangan kontrak multilateral yang telah ditetapkan oleh Bappebti.

Di sisi lain, semester II tahun 2011 ini, JFX merencanakan perdagangan kontrak berjangka syariah. Untuk memperdagangkan kontrak berjangka yang baru ini, JFX sudah bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Yang notabene, dibelakang DSN ada sejumlah perbankan syariah siap untuk mendukung kontrak berjangka Islami tersebut.

Sementara itu, BKDI pun telah mengambil ancang-ancang per Februari 2011, ini, untuk bertransaksi penyaluran amanat ke bursa luar negeri (PALN). Untuk pengembangan transaksi itu, BKDI juga sudah bekerjasama dengan RJ O'Brien. Sebuah perusahaan pialang tertua dari Amerika Serikat. Dan, perusahaan ini merupakan anggota kliring dan bursa berjangka Chicago Mercantile Exchange Group. Serta, kerjasama dengan Phillip Futures Singapura. Perusahaan ini pun merupakan anggota CME dan CME-CBOT. Sedangkan dari dalam negeri dilakukan kerjasama dengan anggota BKDI, yakni PT Millenium Penata Futures. Tahap awal, BKDI akan memperdagangkan sebanyak 13 jenis kontrak berjangka PALN berbasis komoditi pertanian, pertambangan dan energi.



Demikian pula halnya dari sisi sistem resi gudang (SRG), tahun 2011 diharapkan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sehingga pembiayaan SRG semakin dirasakan petani produsen di sejumlah daerah. Hal itu seiring dengan bertambahnya jumlah unit gudang komoditi pangan yang dibangun pemerintah pusat di daerah. Hingga tahun 2010, telah terdapat sebanyak 52 unit gudang komoditi pangan yang dibina Bappebti. Dan, ditahun 2011 telah pula diprogramkan untuk pembangunan sebanyak 15 unit gudang SRG. Sehingga, akhir tahun 2011 telah terdapat sebanyak 67 unit gudang SRG dengan kapasitas komoditi pangan sekitar 100.500 ton.

Pembaca yang budiman, isu pergantian Kepala Bappebti yang sudah merebak sejak September 2010 akhirnya terjawab pada 19 Januari 2011. Menteri Perdagangan telah menunjuk Syahrul R Sempurnajaya sebagai Kepala Bappebti dan menggantikan Deddy Saleh yang juga masih dipercaya menjabat Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag.

Selama menjadi Kepala Bappebti sekitar 2 tahun 7 bulan, Deddy Saleh, dinilai cukup berhasil untuk mengangkat industri perdagangan berjangka komoditi dan SRG. Hal itu tampak nyata dari rendahnya tingkat pengaduan masyarakat akibat transaksi malpraktik pelaku pasar. Di sisi lain, beroperasinya BKDI sebagai bursa berjangka komoditi primer. Dan yang tak kalah penting, diujung kepemimpinannya, Deddy Saleh, telah mengantar dua undang-undang Bappebti untuk diamandemen DPR RI. Dan diharapkan dalam waktu dekat akan rampung dibahas.

Akhirnya, Redaksi pun pantas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik sehingga Buletin Kontrak Berjangka bisa memasuki tahun ke 10 di tahun 2011, ini. Untuk itu, Redaksi pun mencoba melakukan sedikit merubah tampilan dan penambahan rubrikasi. Itu semua disajikan agar para pembaca senantiasa lebih mencintai buletin ini.

Salam! ▲



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasihat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapi Siswanto, Katimin.
Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

11

Resi Gudang

Tahun 2011 Bappebti
Bangun 15 Gudang SRG

20-21

Komoditi

Java Vetiver Rootoil



28

KIPRAH

Deddy Saleh
Berhasil Angkat
Citra PBK



Laporan Utama.....4-10

- Syahrul R Sempunajaya Komandan Baru Bappebti
- JFX Ramu Kontrak Syariah
- Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi
- Arah Kebijakan Kemendag 2011

Berjangka12-13

- BKDI Luncurkan Transaksi PALN
- Volume Transaksi JFX
Meningkat 5 Tahun Terakhir

Agenda14-15

Aktualita16-17

- DIM Amandemen UU PBK Selesai
- Pasar Tanah Tinggi Tangerang
Memutus Mata Rantai Distribusi
- Futures Trading Lecture Series
Program Edukasi BKDI
- Bank Mandiri Masih Pelajari SRG

Analisa.....18

- Harga CPO Stabil
- Harga Emas Cenderung Turun

Info Harga19

Break News22-23

- The Ministry of Trade; Maintain Food
Security and Price Stabilisation
- Vice of Trade, Mahendra Siregar;
Economic Indicator Improvement,
Oppurtunity of Developing Futures Exchange
- House of Representative of The Republic of Indonesia
Amend 2 Regulations for Coftra

Wawasan.....24-25

- Lebih Jauh Tentang The Egyptian Exchange

Kolom26-27

- SRG Solusi Petani



Syahrul R Sempurnajaya

Komandan Baru Bappebti

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, melantik pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan, pada 19 Januari 2011. Salah satu pejabat Eselon I yang dilantik yakni Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dengan dilantikannya Syahrul R Sempurnajaya sebagai Kepala Bappebti, menggantikan Deddy Saleh, akhirnya menjawab teka-teki siapa yang bakal memimpin otoritas perdagangan berjangka komoditi Indonesia.

Isu pergantian kepemimpinan ditubuh Bappebti telah santer terdengar sekitar bulan September 2010 di industri

perdagangan berjangka komoditi. Dikarenakan, mantan Kepala Bappebti Deddy Saleh, juga dipercaya Mari Elka Pangestu, sebagai pejabat sementara di Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dan, pada pelantikan pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan tersebut, Deddy Saleh, pun, resmi ditetapkan sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Dengan ditunjuknya Syahrul R Sempurnajaya sebagai Kepala Bappebti, menjadikannya sebagai Kepala Bappebti yang ke delapan sejak tahun 1997. Berturut-turut pejabat yang pernah

mengisi Kepala Bappebti, yakni Arifin Lumban Gaol, Ridwan Kurnaen, Gusmardi Bustami, Sudarmasto, Ardiansyah Parman, Titi Hendrawati, dan Deddy Saleh.

Syahrul R Sempurnajaya merupakan salah satu dari tiga pejabat yang mendapat promosi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, Syahrul menjabat Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri sejak Maret 2009 - 2011. Jabatan yang sama juga sudah pernah diemban pada tahun 2004 - 2006.

Dilihat dari perjalanan karier Syahrul R Sempurnajaya, merupakan sosok yang cukup melejit dalam mengisi posisi penting di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam tempo sepuluh tahun, alumnus Fakultas Ekonomi, Universitas Pajajaran, Bandung, 1982, itu, sudah meraih jabatan Eselon I. Dedikasinya mulai diperhitungkan sejak tahun 2001 hingga 2004, yang dipercaya menjabat Kasubdit Barang Kimia dan Pertambangan, Direktorat Impor. Dan selanjutnya mengisi posisi-posisi penting Kementerian Perdagangan.

Mari Elka Pangestu dalam menyusun formasi pembantunya di Kementerian Perdagangan, agaknya sudah memperhitungkan sosok Syahrul R Sempurnajaya. Betapa tidak, menurut penuturan Syahrul, saat serah terima jabatan, ketika dipanggil oleh Mari Elka Pangestu, dikatakan, 'saya tahu Bapak belum pernah berada di lingkungan Bappebti. Tetapi melihat pengalaman Bapak diberbagai unit Kementerian Perdagangan, saya percaya Bapak bisa memimpin Bappebti.'

Lebih jauh dikatakannya, memimpin Bappebti merupakan tantangan yang cukup kompleks. Karena di lingkungan Kementerian Perdagangan hanya Bappebti yang memiliki dua undang-undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Syahrul pun betekad memenuhi amanat dua undang-undang tersebut.

"Saya sangat bersyukur masuk ke lingkungan Bappebti dengan didahului Pak Deddy Saleh, yang sudah merintis dan meletakkan berbagai kebijakan untuk pengembangan perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang. Apa lagi saat ini, dua undang-undang itu sedang diamanden DPR. Oleh karena itu saya tetap mengharapakan pendampingan dari Pak Deddy hingga meng-goalkan dua undang-undang itu," ujar Syahrul.

"Amandemen dua undang-undang itu sangat strategis dalam merespon perkembangan perdagangan komoditi yang demikian dinamis. Karenanya, untuk menghadapi kondisi tersebut ada dua kata kunci yakni edukasi dan pemberdayaan baik ke dalam maupun ke luar. Dunia usaha bisa lebih pintar dari kita, makanya tidak perlu malu untuk belajar dari mereka. Dan, kita pun harus berpikir layaknya dunia usaha," ujar Syahrul R Sempurnajaya. ▲

JFX Ramu Kontrak Syariah

Genap beroperasi sepuluh tahun, JFX meramu strategi baru agar tetap eksis mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Kontrak berjangka syariah yang akan dikembangkan JFX merupakan salah satu strategi jitu mengangkat citra perdagangan berjangka Indonesia.

Diperhelatan genap sepuluh tahun usia Jakarta Futures Exchange (JFX), Direksi JFX mencanangkan peluncuran kontrak berjangka syariah pada tahun 2011. Guna mengembangkan kontrak berjangka syariah di Indonesia, JFX bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Berkaitan dengan itu, DSN pun tengah membahas kajian fatwa komoditi murabahah untuk dapat diterapkan di Indonesia. Jika nantinya komoditi murabahah dapat dilakukan di tanah air, hal itu juga dinilai akan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah.

Nota kerjasama antara JFX dan DSN disepakati dihadapan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Deddy Saleh, pada peringatan genap 10 tahun dan gedung baru JFX yang terletak di The City Tower, Jakarta, 20 Desember 2010.

Kepala Bappebti Deddy Saleh, mengatakan, langkah JFX bekerjasama dengan DSN mengembangkan kontrak berjangka syariah merupakan terobosan meyakinkan masyarakat dan industri dalam rangka mengangkat citra perdagangan berjangka komoditi.

"Sejauh ini masyarakat menganggap transaksi perdagangan

berjangka komoditi hanya untuk tujuan spekulasi. Jadi dengan adanya kontrak berjangka syariah ini akan menghilangkan stigma spekulasi itu," jelas Deddy Saleh.

Ditambahkan Deddy Saleh, pengembangan kontrak berjangka syariah tersebut akan diserahkan kepada JFX dan DSN. Pihak DSN tentunya akan memiliki standar yang sesuai dengan kaidah Islam, dan mereka nantinya akan menyusun tata cara bertransaksi.

"Pengelolaan kontrak berjangka syariah di JFX sebaiknya dibentuk unit tersendiri. Sehingga jelas dan terukur. Layaknya industri perbankan, ada yang konvensional tetapi ada juga unit bank syariah-nya," kata Deddy.

Sementara itu, Bendahara DSN MUI, Nadratuzzaman Hosen, mengatakan, langkah awal untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah dengan komoditi murabahah di Indonesia ditandai dengan menyepakati poin-poin kerjasama antara DSN dan JFX.

"Di Malaysia, bursa berjangka syariah dimanfaatkan untuk berlangsungnya produk komoditi murabahah karena berbasis pada perdagangan. Dan di sana banyak masyarakat yang tertarik, bank pakai komoditi murabahah," kata Nadratuzzaman.

Ditambahkan Nadratuzzaman, jual beli dalam Islam harus bersifat riil

dan jika komoditi murabahah nantinya dapat berjalan baik, maka akan dapat bermanfaat bagi bank syariah untuk berkembang.

"Masyarakat juga akan tertarik dengan investasi di perbankan syariah tapi tetap komoditi murabahah ini akan harus ada fatwanya dulu dan ini yang sedang kita kaji komoditi murabahah ala Indonesia," jelas Nadratuzzaman.

Menurut Nadratuzzaman, DSN telah melakukan pembahasan sebanyak dua kali mengenai fatwa untuk produk komoditi murabahah bersama JFX. Direncanakan pada pertemuan kelima nanti, kajian komoditi murabahah baru akan masuk dan dibahas dalam sidang pleno DSN MUI.

"Langkah selanjutnya setelah sidang pleno, DSN akan menetapkan fatwa," tandas Nadratuzzaman Hosen.

Rencana akan hadirnya komoditi murabahah di Indonesia pun disambut baik oleh pelaku perbankan syariah. Diantaranya Direktur Treasury dan International Banking Bank Muamalat Indonesia, Farouk A Alwyni. Dikatakan Farouk, jauh sebelum dilakukan kerjasama itu, pihaknya telah memasukkan usulan kajian komoditi murabahah kepada DSN MUI.

"Komoditi murabahah ini sebagai penambahan produk keuangan, karena sekarang treasury cuma

dengan akad mudharabah. Sehingga, dengan komoditi murabahah nanti bisa memperbanyak opsi produk jadi tidak terbatas hanya satu produk. Untuk prevarication-kan juga perlu komoditi murabahah," papar Farouk.

Di sisi lain ditekankan Farouk, komoditi murabahah menjadi salah satu produk yang dibutuhkan perbankan syariah saat ini dalam mengembangkan bisnisnya. Mengingat masih terbatasnya produk di pasar keuangan syariah. "Saat ini belum banyak tersedianya komoditi murabahah, sehingga menjadi ganjalan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak."

Farouk mencontohkan, saat ini terdapat sejumlah kerjasama placement yang ditawarkan, namun karena kerjasama tersebut dilakukan dengan komoditi murabahah hal itu pun langsung terbentur dengan ketentuan yang ada.

Sementara itu, Direktur Bisnis BNI Syariah, Bambang Widjanarko, juga menyambut baik komoditi murabahah sebagai diversifikasi produk perbankan syariah. "Pembahasan komoditi murabahah sebagai salah satu produk perbankan syariah tentunya kita sambut baik karena untuk murabahah juga cukup banyak digunakan perbankan syariah," kata Bambang.

Meski menurut Bambang, BNI Syariah saat ini belum terlalu membutuhkan produk tersebut, namun hal itu menjadi salah satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan perbankan syariah di masa mendatang.

Islamic Heading

Dipihak lain, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yasri, Perdana Wahyu Santosa, mengakui, bahwa pihaknya yang sejak beberapa tahun lalu mengusulkan kepada Direksi JFX untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah.

"Berdasarkan pengamatan saya beberapa tahun lalu, cukup banyak pelaku pasar dari dalam negeri yang bertransaksi syariah di bursa Malaysia. Jadi, mengapa tidak kita kembangkan di dalam negeri. Sudah jelas Indonesia memiliki sejumlah komoditi primer, dan dilihat dari struktur masyarakat upaya ini akan dapat berkembang berdasarkan demografi yang mayoritas muslim," jelas Perdana.

Pada prinsipnya, tambah Perdana W Santosa, heading atau lindung nilai, sama saja dengan syariah. Transaksi itu tujuannya bukanlah untuk berspekulasi tetapi melindungi diri dan komoditinya jelas-jelas ada sesuai dengan spesifikasinya. "Jadi inilah yang disebut Islamic heading," katanya.

Menurut Perdana, dunia perbankan syariah nasional saat ini cukup banyak memiliki dana yang tidak tersalurkan kepada dunia usaha. Hal itu disebabkan minimnya produk syariah.

"Jadi kita harapkan kerjasama ini dapat menghubungkan dunia finansial syariah dengan ekonomi riil. Oleh karena itu kita harapkan pemerintah memberi dukungan penuh dengan adanya upaya kontrak berjangka syariah di dalam negeri," tegas Perdana.

Dalam pemikiran Perdana W

Santosa, kontrak berjangka syariah yang akan dikembangkan itu berdiri sendiri dengan membentuk unit usaha baru di bawah JFX. "Sebaiknya pengembangan kontrak berjangka syariah itu dikelola secara independen dengan unit manajemen yang berbeda. Sedangkan stakeholder-nya bisa saja dari JFX, DSN maupun perbankan syariah."

Lebih jauh diutarakan Perdana W Santosa, saat ini masing-masing tim sedang berproses untuk segera mewujudkan kerjasama tersebut. "Mungkin sekitar bulan Maret 2011 nanti sudah bisa kita dilihat sejauh mana hasil kerja tim tersebut. Sehingga diharapkan pertengahan tahun ini kontrak berjangka syariah sudah bisa diperdagangkan."

Semester Kedua

Hal senada juga diutarakan Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, kontrak berjangka syariah akan diluncurkan sekitar semester kedua tahun ini. "Target kami enam bulan dari Januari ini. Jadi mungkin Juli 2011 sudah dan bisa direalisasikan."

Bihar menjelaskan, aktivitas syariah atau produk syariah ini merupakan tahap komoditi yang masih baru. Idanya memang baru dibicarakan di awal bulan Desember 2010 dan ditindaklanjuti dengan MOU.

Dia pun menambahkan, penyediaan produk untuk memenuhi permintaan pelaku usaha terutama perbankan syariah untuk mengembangkan komoditi murabahah seperti sudah dikembangkan di Bursa Malaysia. Maka dari itu JFX telah merintis pengembangan produk Murabahah komoditi.

Sebagai tahap awal, JFX telah melakukan kerja sama melalui penandatanganan MOU dengan DSN.

Dikatakan Bihar, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan jelas komoditi yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia komoditi dengan nasabah yang memesan untuk membeli komoditi. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. ▲



Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

Perdagangan berjangka yang telah dikembangkan di tanah air sejak tahun 2000, lambat tapi pasti telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2009, pertumbuhan perdagangan berjangka komoditi untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 26,21 %.

Program Kementerian Perdagangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 - 2014 adalah Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi melalui pengembangan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang di Indonesia. Kegiatan PBK, SRG dan PL yang terpusat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) itu, memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Perdagangan berjangka komoditi, memiliki peranan sebagai pengelolaan risiko- risk management, pembentukan harga- price discovery, dan tersedianya referensi harga- price reference. Sedangkan sistem resi gudang, memiliki peranan sebagai manajemen risiko- risk management, pembiayaan perdagangan- trade financing, stabilisasi harga dan efisiensi biaya perdagangan. Sedangkan pasar lelang memiliki peranan sebagai tempat terbentuknya harga (price discovery), efisiensi rantai perdagangan dan peningkatan mutu dari suatu produk.

Terkait dengan program Kementerian Perdagangan yang diamanatkan kepada Bappebti, berikut ini disarikan pencapaiannya selama tahun 2010.

Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia sebagai salah satu negara produsen utama komoditi di dunia dan sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer seperti komoditi pertanian, perkebunan dan pertambangan yang harganya selalu mengalami fluktuasi, layak memiliki bursa berjangka komoditi. Dengan adanya bursa berjangka komoditi menjadi sarana lindung nilai oleh para pelaku pasar yang rentan terhadap gejolak harga komoditi. Dan, sarana pemben-

tukan harga (price discovery) yang sangat penting bagi dunia usaha, sehingga tujuan Indonesia sebagai basis referensi harga komoditi dunia dapat terwujud.

Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia resmi mulai berjalan sejak 15 Desember 2000, yang ditandai dengan beroperasinya bursa berjangka yang pertama yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange-JFX.

Pada Tahun 2010, guna memberikan pelayanan optimal

dalam pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan tujuan yang diamanatkan pada UU No. 32 Tahun 1997, serta mampu menciptakan sistem dan mekanisme perdagangan yang efisien, efektif, wajar, dan transparan, maka Bappebti telah mengeluarkan izin berdirinya PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Keluarnya izin BKDI merupakan bursa kedua di Indonesia.

Dari dua bursa berjangka yang hadir di tanah air, di bawah ini perkembangan kegiatan perdagangan berjangka periode 2009-2010.

Perkembangan Perdagangan Berjangka Komoditi 2009 - 2010

Jenis Kontrak	2009 (Lot)	2010 (Lot)	Kenaikan / Penurunan (%)
PT. Jakarta Futures Exchange (JFX)			
Kontrak Multilateral	13.228	15.949	20,57 %
- OLE (Olein beserta turunanya)	124	1.754	
- GOL (Emas dan Turunannya)	13.103	14.195	
Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN)	24.614	7.278	(70,43) %
Kontrak Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)	4.426.126	5.393.714	21,86 %
- INDEX	2.496.937	3.378.207	
- FOREX	1.927.151	1.625.697	
- LOCO LONDON	2.038	389.810	
TOTAL JFX	4.463.968	5.416.941	21,35 %
PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)			
- GOLDGR	0	23.285	
- CPOTR	0	193.563	
TOTAL BKDI	0	216.848	100 %
TOTAL JFX + BKDI	4.463.971,83	5.633.789	26,21 %

Sumber : Biro Pemiagaan, Bappebti (diolah)

Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang sesuai Undang-Undang No. 9 tahun 2006, merupakan instrumen pembiayaan yang penting dan efektif. Melalui SRG para petani, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah dapat memperoleh kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank (LKNB) dengan menggunakan Resi Gudang. Sehingga untuk memperoleh pembiayaan tersebut petani produsen tidak memerlukan agunan atau jaminan (fixed-asset) lainnya seperti tanah, rumah, dan kendaraan bermotor untuk memperoleh pembiayaan.

Pembiayaan atau kredit tersebut diperlukan bagi petani dalam menghadapi musim panen raya yang umumnya harga cenderung rendah. Pembiayaan melalui SRG ini dapat mendorong petani untuk terus melakukan budidaya secara berkelanjutan dengan hasil komoditi yang memenuhi standar SNI sehingga memiliki daya saing.

SRG dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh petani tetapi juga pelaku usaha lainnya seperti pedagang, eksportir, prosesor, pabrik. Dengan resi gudang dapat pula menambah cash flow guna meningkatkan modal kerja yang sudah dimiliki. Sedangkan bagi eksportir, resi gudang dapat berfungsi sebagai trade financing untuk melengkapi dokumen transaksi ekspor yang menggunakan Letter of Credit seperti invoice, bill of lading dan certificate of insurance sehingga menambah keyakinan importir dan issuing bank di luar negeri.

Selain itu, melalui data yang terintegrasi antar daerah- lokasi gudang yang tersebar di wilayah Indonesia, Sistem Resi Gudang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengukur ketersediaan pangan nasional seperti komoditi beras, gabah atau jagung. Sehingga dapat mendukung program Ketahanan Pangan Nasional.

Pasar Lelang Komoditi Agro

Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli dengan menggunakan sistem lelang dengan penyerahan kemudian. Tujuan dari PLKA adalah untuk mendapatkan

Perkembangan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Tahun 2009 - 2010

Indikator Perkembangan	Tahun		Keterangan
	2009	2010	
Pembangunan Infrastruktur Gudang	34 Gudang	11 Gudang	Pada Tahun 2011 akan dibangun sebanyak 15 gudang
Resi Gudang yang Diterbitkan	13 Resi Gudang	57 Resi Gudang	Meningkat Sebesar 338 %
Resi Gudang yang Dijaminkan	5 Resi Gudang	32 Resi Gudang	Meningkat Sebesar 540 %
Komoditi yang Disimpan di Gudang dalam Pelaksanaan SRG	Gabah/Beras dan Jagung	Gabah/Beras dan Jagung	
Lembaga Perbankan yang telah Melaksanakan Sistem Resi Gudang (SRG)	3 Bank (BRI, BPD Jatim dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)	4 Bank (BRI, BPD Jatim, Bank BJB, BPD Kalsel)	
Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang telah Menyalurkan Kredit dengan Skema SRG	-	2 LKNB (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT KBI dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM)	
Bank Pelaksana Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)	-	5 Bank (BRI, BPD Jatim, Bank BJB, BPD Jateng dan BPD Kalsel)	Pada tahun 2010, S-SRG mulai disalurkan.

Sumber : Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti (diolah)

harga yang wajar, adil dan transparan. Dengan adanya PLKA diharapkan dapat memperpendek mata rantai perdagangan sehingga terciptanya efisiensi perdagangan, mendukung perekonomian daerah dan perekonomian nasional sebagai sarana pembentukan harga.

Manfaat lain dari adanya PLKA yaitu, dengan pasar lelang terjadi perencanaan pola tanam yang baik oleh petani. Mendorong petani memproduksi secara lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Serta, masyarakat menikmati harga yang lebih kompetitif.

Untuk menjaga kredibilitas PLKA, saat ini Bappebti tengah melakukan revitalisasi pasar lelang. Melalui revitalisasi pasar lelang itu, diharapkan penyelenggaraan pasar lelang dapat berkembang lebih baik karena akan menjadi mandiri dan dilaksanakan oleh pihak yang professional.

Program revitalisasi itu dilaksanakan di lima propinsi, yakni pasar lelang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Profil dan perkembangan Pasar Lelang Komoditi Agro dari tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat di bawah ini. ▲

Profil dan Perkembangan Pasar Lelang Tahun 2009 - 2010

Profil	2009	2010	Keterangan
Penyelenggara	21	21	Tetap
Frekuensi Pelaksanaan Lelang	97	96	Turun sebesar 6 %
10 Komoditi Terbesar	Sapi, Beras, Minyak Goreng, Kentang, Teh, Ckg Sawit, Cabe, Jagung, Kopra dan Kopi.	Beras, Sapi, Cabe, Kentang, Jagung, Buah, M. Nilam, Coklat, Kemiri dan Tomat	
Nilai Transaksi	1,7 Triliun	1,6 Triliun	Turun sebesar 6 %

Sumber : Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti (diolah)



Arah Kebijakan Kemendag 2011

Kementerian Perdagangan untuk tahun 2011 menargetkan pertumbuhan ekspor non migas mencapai 14 % dibandingkan dengan tahun 2010, hingga mencapai US\$ 139-146 miliar. Target pertumbuhan dengan asumsi ekonomi dunia di tahun 2011 tumbuh mencapai 4.2 %. Dan, indikator lainnya terjadi kenaikan harga komoditas di pasar internasional serta sektor investasi tumbuh mencapai 10 - 11 %.

Dinamika perekonomian dunia dan di dalam negeri telah mewarnai perjalanan pembangunan di bidang perdagangan selama periode Januari-Desember 2010. Perekonomian global secara bertahap kembali pulih lebih baik dari yang diperkirakan semula. Meski, pemulihan itu berlangsung dengan tingkat yang berbeda diantara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang.

Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh mendekati 5 %. Pertumbuhan PDB dunia itu dipelopori kinerja ekonomi negara-negara berkembang yang tumbuh cepat (emerging market economies), termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan 5,9 % sampai triwulan III 2010 dibanding tahun sebelumnya, dan diperkirakan tumbuh 6 % untuk seluruh tahun 2010.

Ditinjau dari berbagai pertumbuhan sektor, kontribusi terbesar pertumbuhan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai sebesar 12,8 %. Kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,3 %.

Terkait dengan isu-isu di bidang perdagangan, baik nasional

maupun yang bersifat global serta realita tantangan pembangunan perdagangan saat ini dan masa mendatang, maka dalam konteks pembangunan nasional di bidang perekonomian, fokus prioritas pembangunan sektor perdagangan sesuai yang tercantum RPJM Nasional 2010-2014 diarahkan pada,

10 Program Kementerian Perdagangan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan
4. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
5. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
6. Peningkatan Perlindungan Konsumen
7. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
8. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
9. Pengembangan Ekspor Nasional
10. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi.

pertama peningkatan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor.

Kedua, peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional, penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi, dan peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan

strategi Kementerian Perdagangan, maka akan dilakukan program-program kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama.

Prospek Ekspor Non-migas

Ekspor nonmigas hingga akhir 2010 diperkirakan mencapai US\$ 124-127 miliar dengan pertumbuhan 27 % - 30 % (yoy). Dengan tingkat pertumbuhan itu, maka target ekspor non migas tahun 2011 ditetapkan adalah sebesar US\$ 139-146 miliar dengan pertumbuhan 12 % - 14 % (yoy).

Target pertumbuhan itu didasari dengan asumsi ekonomi dunia di tahun 2011 tumbuh dengan mencapai 4.2 %. Dan, adanya kenaikan indikator lainnya, seperti kenaikan harga komoditas di pasar internasional serta sektor investasi tumbuh mencapai 10 - 11 %.

Prospek peningkatan ekspor nonmigas di tahun 2011 didukung oleh peningkatan ekspor

beberapa komoditas utama. Seperti, komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT) yang ditargetkan meningkat lebih dari 10 %. Ekspor produk alas kaki ditargetkan tumbuh lebih dari 20 %. Pertumbuhan ekspor alas kaki ini didorong oleh pulihnya ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. Serta, berkembangnya pasar non-tradisional, terutama di Eropa Timur seperti di Rusia, Ukraina, Kazakhsan dan Asia Tengah.

Ekspor produk kertas juga ditargetkan meningkat sejalan dengan adanya langkah-langkah pemerintah mengamankan akses pasar produk kertas Indonesia yang kerap menghadapi

hambatan. Ekspor produk crude palm oil (CPO) dan turunannya juga ditargetkan tumbuh mencapai 16 %. Pertumbuhan itu dengan adanya rencana investasi sebesar US\$ 1,2 miliar pada tahun 2011 pada sektor CPO. Serta tingginya potensi pasar di Timur Tengah dan Eropa Timur.

Di sisi lain, adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri hilir CPO serta promosi sustainable palm oil.

Ekspor komoditi kakao olahan pun ditargetkan meningkat pertumbuhan mencapai 61 %. Pertumbuhan itu diharapkan terjadi akibat meningkatnya kapasitas produksi kakao olahan di dalam negeri menjadi 280 ribu ton pada tahun 2011.

Selain itu, konsistensi kebijakan pemerintah mendorong proses pengolahan kakao di dalam negeri dan adanya program Gerakan Na-



sional Kakao untuk peningkatan mutu dan produksi biji kakao berpotensi meningkatkan ekspor kakao dan produk kakao.

Untuk ekspor komoditi kopi, juga diperkirakan naik mencapai 5 %. Kenaikan ekspor itu diharapkan dari peningkatan produksi serta penetrasi pasar ke sejumlah negara tujuan baru.

Sementara itu, langkah konkrit pemerintah dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi eksportir Indonesia, maka pemerintah melalui Tim Nasional Promosi Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) akan membentuk Forum Ekspor yang akan menjadi wadah dialog dan mencari solusi bersama di antara para pemangku-kepentingan Pemerintah maupun dunia usaha. ▲

Perkiraan Ekspor Non Migas 2010 dan Target Ekspor Non Migas 2011

Uraian	Realisasi			Perkiraan 2010	Target 2011	
	2008	2009	Jan-Nov 2010	Prediksi Kemendeg	Target RPJMN	Prediksi Kemendeg
Ekspor Non Migas						
Nilai (US\$ Miliar)	107.9	97,5	115,9	124-127.0		139-146.0
Growth	17.3	-9.6	33.6	27.0-30.0	11-12%	12.0-15.0

Tahun 2011 Bappebti Bangun 15 Gudang SRG

Komitemen pemerintah pusat mengembangkan pembiayaan sistem resi gudang di sejumlah daerah.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ditahun 2011, ini, kembali memprogramkan pembangunan gudang komoditi pangan dengan skema sistem resi gudang (SRG) di sejumlah daerah sentra produksi. Dari hasil penajakan dan studi kelayakan yang dilakukan Bappebti di sejumlah daerah, diputuskan sebanyak 15 kabupaten yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan gudang pangan.

Dengan dibangunnya gudang komoditi pangan tahun 2011 di 15 kabupaten itu, total gudang komoditi pangan menjadi 67 unit. Seluruh pembangunan gudang komoditi pangan tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat- Kementerian Perdagangan sejak tahun 2008. Diperkirakan dengan sebanyak 67 unit gudang komoditi pangan tersebut, akan dapat menampung lebih dari 100.500 ton komoditi. Dengan rincian satu unit gudang bisa menampung lebih dari 1.500 ton komoditi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, sumber pembiayaan pembangunan pangan di 15 kabupaten tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan 2011. Pembangunan gudang pangan tersebut diperhitungkan akan menyedot biaya sebesar Rp 72,2 miliar.

Menurut Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Bappebti, Sabri Usman, pembangunan gudang pangan dengan skema sistem resi gudang tersebut diprioritaskan pada komoditi jagung dan komoditi gabah. Sedangkan pengerjaannya dimulai dari awal tahun hingga akhir tahun 2011.

“Dari sebanyak 15 gudang pangan yang akan dibangun itu, sekitar 80 persen merupakan gudang pangan komoditi jagung, dan sisanya 20 persen untuk gudang pangan komoditi gabah,” jelas Sabri.

“Pembiayaan pembangunan gudang pangan di 15 kabupaten itu berasal dari dana alokasi khusus Kementerian Perdagangan tahun 2011. Nilainya mencapai Rp 72,2 miliar. Dari DAK itu tidak seluruhnya untuk pembangunan gudang pangan, melainkan juga untuk pengadaan mesin pengering- dryer,” kata Sabri.

Lebih jauh diutarakan Sabri Usman, program pembangunan ini sudah mulai diproses di 15 daerah yang menerima DAK Kementerian Perdagangan. “Karenanya Bappebti mengharapkan pemerintah daerah agar lebih cepat untuk melakukan proses tender sesuai dengan peraturan. Sehingga diakhir tahun 2011 seluruh alokasi dana sudah tersalurkan dan gudang pangan sudah dapat dioperasikan,” tandas Sabri.

Sarana Perdagangan

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Gunaryo, dalam membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2011, di Jakarta, mengatakan, pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan tahun 2011 merupakan tahun ketiga pemanfaatan alokasi DAK dan sesuai dengan RKP disesuaikan menjadi “DAK Bidang Sarana Perdagangan”.

Sosialisasi ini mengambil tema Optimalisasi Pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Guna Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Perdagangan.

Menurut Gunaryo, program DAK tahun 2011 memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan DAK tahun 2010. “Beda DAK tahun sebelumnya adalah adanya pembagian 3 Sub Bidang, yaitu Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) yang peruntukannya diarahkan untuk pembangunan pasar desa dan pasar tingkat kecamatan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Perbedaan kedua, Sub Bidang Pembangunan Gudang Komoditas Pertanian berikut Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam rangka penerapan Sistem Resi Gudang sebagai alternatif pembiayaan. Sedangkan yang ketiga, Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal dalam rangka meningkatkan tertib ukur. ▲

Pembangunan Gudang Komoditi Pangan SRG 2011

1. Kabupaten Tanah Karo
2. Kabupaten Simalungun
3. Kabupaten Lampung selatan
4. Kabupaten Lampung Tengah
5. Kabupaten Lampung Timur
6. Kabupaten Tanggamus
7. Kabupaten Tulang Bawang
8. Kabupaten Blora
9. Kabupaten Wonogiri
10. Kabupaten Blitar
11. Kabupaten Lamongan
12. Kabupaten Probolinggo
13. Kabupaten Situbondo
14. Kabupaten Tuban
15. Kabupaten Pahuwatu

BKDI Luncurkan Transaksi PALN

Komitmen BKDI dalam memberi pelayanan maksimal kepada investor untuk meningkatkan portofolio investasi. Serta, sarana meningkatkan transaksi multilateral bagi perusahaan pialang berjangka anggota.

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) merencanakan selenggarakan transaksi penyaluran amanat ke bursa luar negeri (PALN) per Februari 2011. Untuk menyelenggarakan transaksi PALN, BKDI telah menjalin kerjasama dengan dua perusahaan asing luar negeri dan satu dari dalam negeri. Hal itu sebagaimana diatur oleh otoritas perdagangan berjangka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Perusahaan pialang asing yang sudah digandeng BKDI yakni, RJ O'Brien salah satu perusahaan pialang tertua di Amerika Serikat. Perusahaan pialang ini merupakan anggota kliring dan bursa berjangka Chicago Mercantile Exchange Grup, yang mencakup Intercontinental Exchange (ICE), NYSE Liffe, dan Chicago Climate Exchange. Selanjutnya, perusahaan pialang berjangka yang berbasis di Singapura yakni Phillip Futures Singapura. Perusahaan ini juga merupakan anggota CME dan CME-CBOT. Sedangkan perusahaan pialang berjangka dari dalam negeri PT Millennium Penata Futures.

Menurut Dirut BKDI, Megain Widjaya, tahap awal pihaknya akan memperdagangkan sebanyak 13 produk PALN yang telah direkomendasikan oleh Bappebti.

"Transaksi PALN ini merupakan komitmen BKDI dalam memberi pelayanan maksimal kepada investor untuk meningkatkan portofolio investasi. Di sisi lain, untuk meningkatkan transaksi multilateral bagi perusahaan pialang berjangka anggota BKDI," demikian antara lain diutarakan Megain Widjaya, saat memberi keterangan pers, pada 19 Januari 2011.

Bagi investor di dalam negeri, tambah Megain, dengan adanya transaksi PALN ini bisa melebarkan jenis investasi ke berbagai komoditi yang ada di luar negeri. Seperti transaksi kontrak berjangka komoditi pertanian, per-tambangan dan energi.

"Secara umum, kontrak berjangka PALN sudah siap ditransaksikan. Karena lembaga kliring kami juga sudah siap operasi," jelas Megain Widjaya.

Untuk dapat bertransaksi kontrak berjangka PALN tentunya sudah menjadi anggota BKDI dan anggota lembaga kliring Identrus Securitris Internasional (ISI). Serta, memperoleh izin dari bertransaksi PALN. Di samping itu, perusahaan pialang wajib menambah dana jaminan sebesar Rp 500 juta. Dan, sudah melakukan kerjasama antara dengan bursa berjangka.

Cegah capital outflow

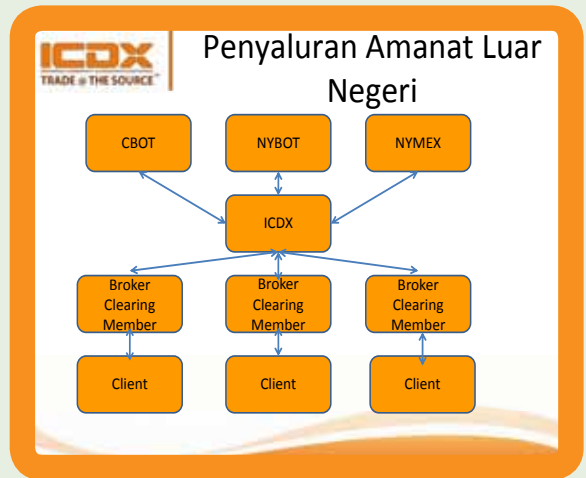
Pada kesempatan yang sama, Direktur ISI, Nursalam, mengatakan, untuk menghindari terjadinya capital outflow perusahaan pialang asing harusnya memiliki rekening terpisah di dalam negeri. Sehingga semua transaksi itu dilakukan di bank yang ada di dalam negeri.

"Kalau pun kemudian pihak pialang asing menarik dana dari bank, tidak bisa dilakukan segera karena butuh proses.

Jadi, dana dari nasabah itu dapat bertahan lebih lama di dalam negeri," jelas Nursalam.

Hanya saja, tambah Nursalam, kebijakan mewajibkan pialang asing memiliki rekening terpisah di dalam negeri belum diatur pada peraturan PALN yang terbaru. "Tetapi kami sudah mengutarakan hal ini kepada otoritas."

Sementara itu, dikatakan Nursalam, untuk transaksi sebanyak 13 kon-



trak berjangka PALN diperdagangkan dengan menggunakan dua mata uang yakni rupiah dan dolar Amerika Serikat. "Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappebti."

Namun kata Nursalam lebih jauh, transaksi PALN ke depan masa tidak tertutup kemungkinannya ditransaksikan dengan menggunakan mata uang negara lainnya. Seperti bertransaksi dengan mata uang Yen dan Euro. "Terkait hal itu, kami sudah mengutarakan dengan pihak otoritas perdagangan berjangka untuk kembali merevisi peraturan terkait PALN," jelas Nursalam. ▲

Kontrak Berjangka PALN BKDI

1. Kontrak berjangka jagung
2. Kontrak berjangka mini jagung
3. Kontrak berjangka gandum
4. Kontrak berjangka mini gandum
5. Kontrak berjangka kedelei
6. Kontrak berjangka mini kedelei
7. Kontrak berjangka minyak kedelei
8. Kontrak berjangka kakao
9. Kontrak berjangka kopi
10. Kontrak berjangka gula
11. Kontrak berjangka minyak mentah
12. Kontrak berjangka mini minyak mentah
13. Kontrak berjangka gasoline

Volume Transaksi JFX Meningkat 5 Tahun Terakhir

Volume transaksi Jakarta Futures Exchange (JFX) dalam lima tahun belakangan mengalami lonjakan yang signifikan. Terjadinya lonjakan transaksi JFX itu seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang juga mengalami kemajuan selama lima tahun ini. Di sisi lain, lonjakan volume transaksi JFX didorong dari pertumbuhan pelaku pasar serta semakin baiknya pemahaman masyarakat akan perdagangan berjangka komoditi.

Berdasarkan data yang dilansir JFX, volume transaksi selama tahun 2010 mencapai 5.416.878 lot. Atau mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2005 volume transaksi hanya mencapai 1,9 juta lot, akhir tahun 2010 transaksi di JFX melonjak menjadi 5.416 lot. Pada periode yang sama, volume perdagangan harian meningkat sebesar 171 % dari 7.686 lot pada 2005 menjadi 20.387 lot pada 2010. Dibandingkan dengan tahun 2009, transaksi JFX juga meningkat sebesar 21 persen ditahun 2010, dari 4.479.257 lot menjadi 5.416.878 lot.

Menurut penilaian Direktur JFX, Roy Sembel, peningkatan volume transaksi JFX sejalan dengan kemajuan perekonomian Indonesia selama lima tahu terakhir. "Oleh karena itu industri perdagangan berjangka pada umumnya memang memiliki prospek yang bagus bagi Indonesia," ujar Roy.

Sementara itu, menurut Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, lonjakan transaksi JFX disebabkan tiga hal utama. Pertama, dalam lima tahun terakhir jumlah anggota JFX meningkat signifikan. "Tahun 2005, hanya ada puluhan anggota. Tetapi pada 2010 lalu, sudah tercatat sebanyak 120 anggota," jelas Bihar.

Yang kedua, tambah Bihar, jenis kontrak berjangka komoditi yang ditransaksikan di JFX juga bertambah. Dan ketiga, semakin baiknya pemahaman masyarakat mengenai perdagangan berjangka komoditi.

"Oleh karena itu, untuk ke depan kita mengupayakan bagaimana masyarakat bisa lebih banyak lagi melakukan transaksi di bursa berjangka. Caranya, diberi pemahaman dan pengetahuan. Sehingga fungsi bursa benar-benar menjadi sarana

informasi harga," terang Bihar.

Terkait dengan itu, Dirut JFX, Made Soekarwo, juga mengharapkan peran serta pelaku pasar untuk bisa bersama-sama memberi pemahaman dan pengetahuan perdagangan berjangka ke pada masyarakat. Sehingga target volume transaksi multilateral anggota JFX yang ditetapkan otoritas minimal 5 % juga dapat digenot. Dari keseluruhan transaksi JFX, transaksi bilateral adalah yang mendominasi. Sedangkan transaksi multilateral hanya mencapai 1 %.

"Jika pelaku pasar juga melakukan pendidikan dan sosialisasi perdagangan berjangka komoditi terhadap masyarakat pasti transaksi multilateral juga bisa meningkat," jelas Made.

Kalau itu bisa tercapai, tambah Made, transaksi JFX juga akan meningkat sebesar 5 % dari transaksi multilateral.

"Bila peningkatan itu tercapai, maka pada tahun 2012 cita-cita agar pembentukan harga di JFX dapat dijadikan referensi harga komoditi bagi pelaku usaha jadi kenyataan," papar Made Soekarwo. ▲



Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, melantik Pejabat Kementerian Perdagangan. Diantaranya Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurna sedangkan mantan Kepala Bappebti Deddy Saleh dilantik menjadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri. 19 Januari 2011



Serah terima jabatan Kepala Bappebti dari Deddy Saleh kepada Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya. Hal yang sama juga dilakukan serah terima Ketua Dharma Wanita Bappebti. Dalam Kesempatan itu Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya meninjau ruangan seluruh staff dan pejabat Bappebti. Senin 24 Januari





On Job Training Bappebti ke Hong Kong Merchantile Exchange, diterima Mr. Albert Helmig, dan didampingi Jimmy Ho, Chief Operating Officer Market, serta Catherine Zhang, Marketing Officer, Anna Bian Marketing Officer. 16-17 Desember 2010



Tim Bappebti melakukan kunjungan ke bursa komoditi Thailand The Agriculture Futures Exchange of Thailand. 6-10 Desember 2010

DIM Amendemen UU PBK selesai

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah merampungkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) amendemen UU No. 32/1997, tentang, perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian, tahap selanjutnya DIM akan dibahas bersama dengan antara pemerintah dan DPR.

Kepala Bappebti, Deddy Saleh, usai menghadiri rapat kerja antara Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR, pada 17 Januari lalu, mengatakan, pemerintah sudah

selesaikan DIM amandemen UU No. 32/1997.

"Menteri Perdagangan pun sudah menyampaikan DIM tersebut kesejumlah kementerian lain yang terkait. Seperti, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan lainnya," ungkap Deddy Saleh.

lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, dengan selesainya DIM amandemen undang-undang perdagangan berjangka itu, pemerintah tinggal menunggu panggilan dari DPR. Karena, presiden juga sudah mengirimkan

surat ke pimpinan DPR.

"Jadi kami- pemerintah tinggal menunggu panggilan dari DPR untuk dilakukan pembahasan," kata Deddy.

Sementara itu, Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto, mengutarakan, DPR masih melakukan sinkronisasi bagi amendemen UU No.32/1997. Selanjutnya, DPR akan membahas kembali sinkronisasi itu pada persidangan berikutnya.

"Kami akan membahas kembali pada persidangan berikutnya. Saat ini masih harus disinkronisasi," kata Airlangga. ▲

Pasar Tanah Tinggi Tangerang

Memutus Mata Rantai Distribusi

Spekulasi adanya pihak-pihak yang menguasai jaringan dan jalur distribusi komoditi cabai di tanah air akhirnya terkuak. Hal itu dengan ditemukannya cabai impor dari Thailand dan Cina di pasar tradisional di wilayah Jabodetabek pada pertengahan Januari 2011. Modus yang digunakan, suplai cabai dari sentra produksi dengan sengaja tidak dipasarkan sehingga harga cabai melonjak tinggi. Dan di saat yang sama, komoditi cabai impor itu dimasukkan ke pasar lokal dengan harga yang setara berkisar Rp 100.000 per kg. Untuk mengelabui masuknya cabai impor, para pelaku itu mengoplos dengan cabai lokal.

Berdasarkan pantauan sebuah media nasional di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, harga rawit merah Thailand

berukuran kecil Rp 55.000 per kg, sedangkan yang lebih besar Rp 40.000 - Rp 45.000 per kg. Sedangkan cabai yang berasal dari Cina berkisar Rp 60.000 per kg.

Di satu sisi, masuknya cabai impor tersebut akan menekan harga. Namun, pihak-pihak yang menguasai pasar cabai itu sudah terlebih dahulu menanggung untung dari tingginya harga.

Stabil

Tingginya harga cabai di berbagai pasar tradisional di tanah air sejak akhir tahun 2010, tidak berpengaruh langsung bagi pedagang cabai yang terdapat di Pasar Tanah Tinggi, Tangerang, Jakbar. Menurut pengelola Pasar Tanah Tinggi,

Tangerang, Hartono Wignjopranoto, harga cabai dipasarkan oleh pedagang relatif stabil. Hal itu dikarenakan konsep pengelolaan pasar yang benar.

"Dari sejumlah kios yang ada di pasar kami, yang diutamakan pedagangnya adalah petani produsen. Dengan demikian akan memutus jalur mata rantai distribusi. Sehingga hasil panen petani itu bisa langsung dipasarkan di Pasar Tanah Tinggi," jelas Hartono.

"Saat harga cabai melonjak tinggi di sejumlah daerah, di Pasar Tanah Tinggi, Tangerang, harga cabai berkisar Rp 25.000 hingga Rp 65.000, jadi relatif stabil. Karenanya dalam waktu singkat pasokan cabai lebih dari 100 ton setiap hari, langsung ludes dipasarkan ke pedagang kecil disekitar Jakarta Barat dan Banten," beber Hartono. ▲

Futures Trading Lecture Series Program Edukasi BKDI

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dalam kiprahnya mengembangkan perdagangan berjangka komoditi Indonesia, tengah berupaya mewujudkan program pendidikan tentang perdagangan berjangka komoditi. Upaya itu dengan membentuk BKDI University. Langkah awal BKDI menyelenggarakan program tersebut, mulai 1 Februari hingga 15 Maret 2011 (setiap hari Selasa) akan digelar Futures Trading Lecture Series.

"Tahap awal program Futures Trading Lecture Series ini akan kami sasar para jurnalis dari berbagai media nasional. Kemudian, program yang sama akan diarahkan kepada masyarakat," jelas Dirut BKDI, Megain Widjaya.

Mengapa ditahap awal ini kami memilih para jurnalis, tambah Megain, karena kami inginkan para jurnalis bisa memahami dan mendalami apa itu perdagangan berjangka komoditi dan manfaatnya bagi perekonomian. "Sehingga pada akhirnya bisa menyampaikan informasi yang tepat tentang perdagangan berjangka komoditi," jelas Megain.

Untuk kelompok jurnalis, BKDI telah mencanangkan program itu dengan gratis tanpadipungut biaya. Sedangkan untuk kelompok masyarakat umum program ini akan diselenggarakan sekitar bulan Maret - April 2011.

Materi yang disampaikan pada Futures Trading Lecture Series, mencakup industri perdagangan berjangka, perdagangan berjangka komoditi, mekanisme perdagangan berjangka komoditi, produk-produk komoditi dan perkembangan seputar industri perdagangan berjangka komoditi dunia.

Wajib

Menurut Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, bursa berjangka berkewajiban mengedukasi masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi. Oleh karena itu, dikatakan Alfons, Bappebti akan mewajibkan adanya divisi khusus edukasi di bursa berjangka. Hal itu guna mendorong bursa berjangka agar lebih proaktif.

"Regulator akan mengenakan sanksi apabila bursa berjangka tidak melaksanakan edukasi tersebut. Dan, Bappebti akan mengatur agar bursa berjangka lebih proaktif melakukan edukasi mengenai komoditas berjangka. Apabila tidak, kami akan mengenakan sanksi, seperti pialang yang melakukan pelanggaran administratif," jelas Alfons Samosir.

Lebih jauh dikatakan Alfons, edukasi itu juga mendorong pelaku pasar dalam meningkatkan volume transaksi multilateral yang telah dipatok minimal 5% dari volume transaksi bilateral. "Orang yang bertanggung jawab di divisi edukasi itu harus orang yang benar-benar menguasai perdagangan berjangka komoditas," tutur Alfons.

Menurut Alfons, edukasi itu berupa pelatihan dan seminar berskala internasional. Bursa berjangka juga harus mengunjungi daerah-daerah potensial dan mendirikan gerai bursa sebagai perpanjangan tangan. Selain itu, bursa juga harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti institut dan universitas. ▲

Bank Mandiri Masih Pelajari SRG

Kalangan perbankan nasional masih mengkaji penilaian stok dan kedudukan jaminan komoditi untuk menggarap bisnis pembiayaan sistem resi gudang.

Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Mandiri Tbk., Sentot A. Sentausa, mengatakan, perseroan terbuka terhadap potensi bisnis pembiayaan resi gudang. Namun, pihaknya masih mempelajari penilaian stok dan kedudukan jaminan dalam skema pembiayaan sistem resi gudang.

"Nilai stok komoditas yang disimpan dengan sistem resi gudang dapat berubah dari waktu ke waktu. Nilai komoditas pada saat masuk ke dalam gudang dengan ketika stok itu diambil belum tentu sama. Hal itu yang masih kita pelajari dalam menyiapkan pembiayaan resi gudang ini," jelasnya.

Selain itu, menurut Sentot, pihaknya juga masih perlu mempelajari sistem transaksi dan siklus usaha para pelaku sistem resi gudang.

Sentot menuturkan, bahwa

pihaknya dapat menetapkan skema pembiayaan setelah mempelajari nilai stok, kedudukan jaminan, dan sistem transaksi serta siklus usaha pelaku bisnis komoditas.

"Bank memerlukan standar yang tetap. Hal itu masih kami pelajari dari sistem resi gudang. Jika sudah matang, kami bisa segera menetapkan skema pembiayaan melalui pembentukan kluster-kluster," katanya. ▲

Harga CPO Relatif Stabil

Kekhawatiran terhadap berkurangnya pasokan Minyak Kelapa Sawit Mentah masih menjadi penyebab utama kenaikan harga CPO selama beberapa bulan terakhir. Adanya cuaca yang buruk (musim hujan yang berkepanjangan) di negara produsen CPO seperti Indonesia dan Malaysia menyebabkan arus pasokan Tandan Buah Segar ke pabrik kelapa sawit (PKS) menjadi tersendat sehingga proses produksi CPO terganggu. Tren peningkatan harga CPO juga disebabkan oleh lonjakan harga komoditi Kedelai yang menjadi substitusi CPO sebagai minyak nabati. Kenaikan harga komoditi substitusi CPO ini juga dipicu oleh faktor cuaca buruk yang diperkirakan mengganggu produksi Kedelai seperti Argentina sebagai produsen Kedelai terbesar ketiga di dunia yang dilanda kekeringan.

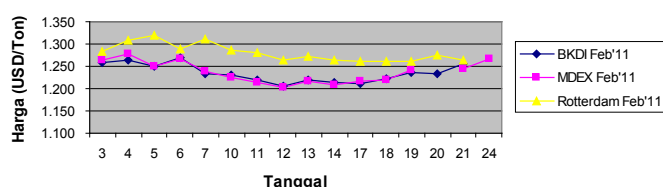
Hingga pekan ketiga Januari 2011, harga CPO telah mengalami pergerakan harga yang relatif stabil dengan tren yang meningkat. Harga rata-rata Minyak Kelapa Sawit Mentah

(CPO) yang ditransaksikan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk penyerahan Januari 2011 berada pada level harga US\$ 1.256 per ton, dengan harga tertinggi US\$ 1.256 per ton dan harga terendah US\$ 1.195 per ton. Untuk bulan penyerahan yang sama, di Malaysia Derivatives Exchange (MDEX), harga rata-rata CPO berada pada level US\$ 1.240 per ton dan rata-rata di Rotterdam US\$ 1.298 per ton.

Pada pertengahan Januari 2011, harga CPO sempat mengalami pelemahan. Kontrak CPO untuk pengiriman Maret 2011 di MDEX turun sebanyak 1,38% dari US\$ 1.206 per ton menjadi US\$ 1.192 per ton (transaksi 12/01). Penurunan harga disebabkan karena adanya spekulasi akan terjadi peningkatan

produksi. Departemen Agrrikultur AS menyatakan produksi CPO dunia akan naik 6,9% menjadi 47,9 juta metrik ton. Indonesia, sebagai produsen terbesar pada 30 Desember lalu mengatakan produksinya akan akan naik 5,3% menjadi 24 juta ton di 2011. Diperkirakan produksi minyak sawit dunia akan meningkat signifikan pada 2011, terutama dari April atau Mei 2011. Akan tetapi hingga minggu ketiga Januari 2011, tren harga untuk komoditi CPO di 3 (tiga) bursa yaitu MDEX, BKDI dan Rotterdam memiliki tren yang searah dan relatif stabil. Dari Awal Tahun 2011 Hingga Pekan Ketiga Januari, Harga Emas Terus Merosot. ▲

Perkembangan Harga CPO Penyerahan Februari 2011



Sumber: BKDI, Reuters dan Bappebti (Diolah)

Emas Cenderung Merosot

Selama Januari 2011, harga Emas cenderung mengalami penurunan harga. Penurunan harga tersebut terjadi karena penguatan dollar AS sehingga mengurangi permintaan terhadap emas. Melemahnya harga Emas juga disebabkan oleh adanya laporan bahwa pemerintah India akan memberlakukan pajak impor emas. Hal tersebut langsung menekan pasar dimana India merupakan salah satu negara pengimpor perhiasan terbesar di dunia.

Di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), pada awal perdagangan untuk penyerahan Januari 2011, Emas dibuka pada level harga US\$ 1.425 per troy ounce dan di akhir perdagangan ditutup pada level harga US\$ 1.365 per troy ounce. Harga rata-rata Emas selama Januari 2011 berada pada harga US\$ 1.392 per troy ounce dengan harga tertinggi US\$ 1.425

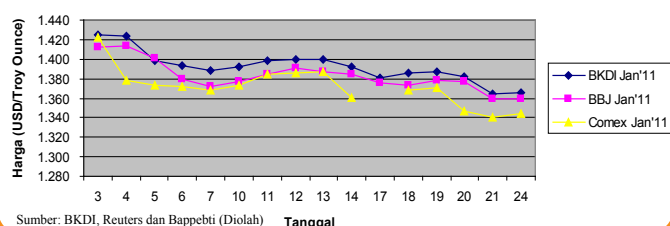
troy ounce dan harga terendah US\$ 1.364 troy ounce. Untuk bulan penyerahan yang sama, harga rata-rata Emas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebesar US\$ 1.372 per troy ounce., dengan harga tertinggi US\$ 1.423 per troy ounce. dan harga terendah US\$ 1.341 per troy ounce.

Berdasarkan grafik di atas, menjelang akhir Januari 2011 harga Emas cenderung bergerak turun. Turunnya emas tidak terlepas dari adanya imbas positif yang diperoleh dari adanya pengaruh penguatan dollar terhadap euro. Euro mengalami depresiasi terhadap dollar akibat

adanya sentimen negatif yang muncul dari pernyataan bank sentral Eropa. Bank sentral Eropa akan berencana mengucurkan paket stimulus sebesar 578,2 miliar dollar ke beberapa negara di kawasan Eropa.

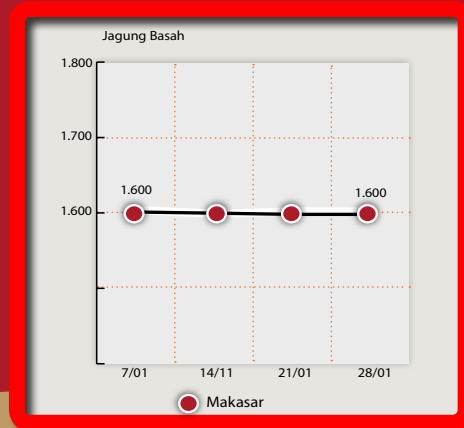
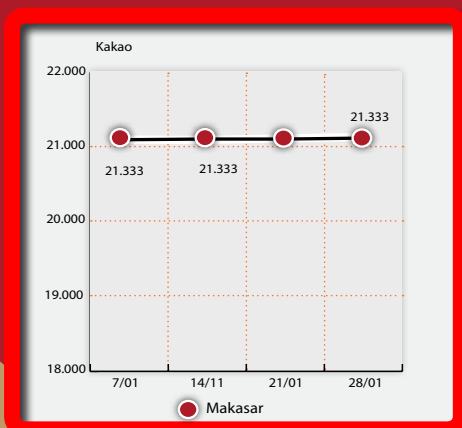
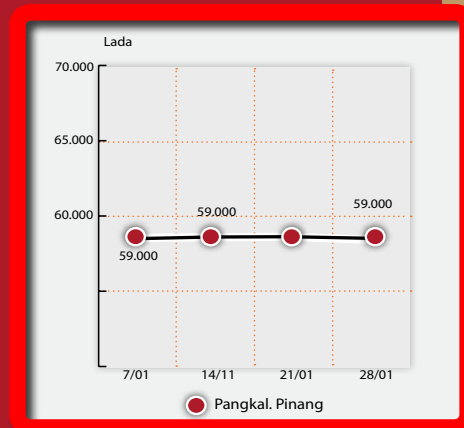
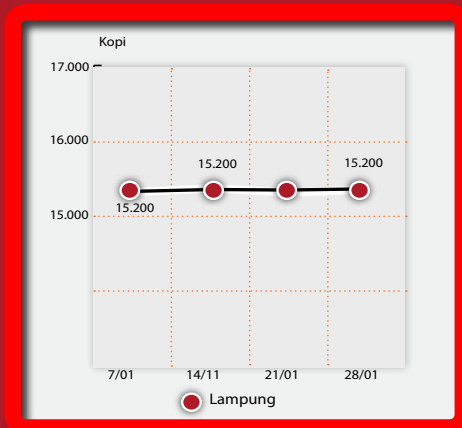
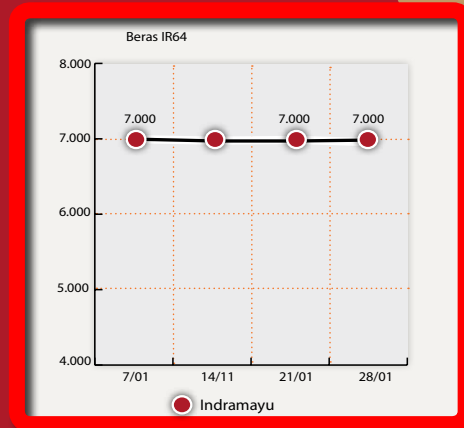
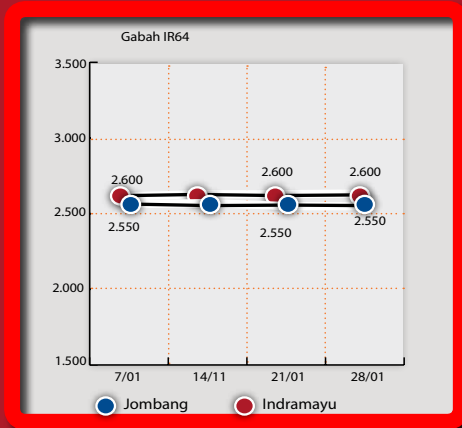
Selain itu spekulasi terjadinya pemulihan ekonomi di AS melemahkan permintaan emas sebagai safe heaven. Pasar mempersepsikan membaiknya industri jasa dan penambahan lapangan kerja di AS sebagai indikasi berjalannya pemulihan ekonomi dunia. ▲

Pergerakan Harga Emas Penyerahan Januari 2011



Sumber: BKDI, Reuters dan Bappebti (Diolah)

Harga Komoditi (Rp/Kg)



Java Vetiver Rootoil

Minyak atsiri akar wangi yang berasal dari Garut sangat populer dikalangan para pengusaha mancanegara. Karenanya komoditi ini dikenal dengan sebutan java vetiver rootoil. Harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Selain sebagai bahan dasar produk kosmetik dan kesehatan, akar wangi sangat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan.

Akar wangi yang dalam bahasa latin adropongon squarosus linn atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan vetiveria zizanioides, tumbuh secara alami di tempat-tempat berpayau di wilayah utara India, Bangladesh, Srilangka, Myanmar dan di banyak tempat di kawasan Asia Tenggara. Selain dapat tumbuh di wilayah tropis, tanaman ini juga bisa ditemukan di wilayah subtropis seperti Cina.

Vetiver telah dibudidayakan masyarakat India selama berabad-abad untuk mengendalikan erosi dan diambil minyaknya sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk kosmetik dan kesehatan. Hingga saat ini, ada beberapa negara yang dikenal sebagai produsen minyak akar wangi, yakni Haiti, India, Cina dan Brazil. Dan tak luput pula Indonesia. Kabupaten Garut merupakan salah satu sentra produksi terbaik akar wangi. Oleh karena itu komoditi ini juga dikenal dengan java vetiver rootoil. Di tanah air penyebaran tanaman ini dapat ditemui di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Produksi minyak atsiri akar wangi Indonesia sebagian besar diekspor ke Singapura, India, Jepang, Hongkong,

Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Swiss, dan Amerika Serikat. Hingga kini pun, peluang ekspor masih terbuka, terutama ke Asia Selatan, Asia Timur, Eropa Timur, dan Amerika Selatan. Apalagi tak banyak negara yang menjadi kompetitor, hanya Haiti dan Borbon sebagai pesaing. Bahkan, bencana alam yang melanda Haiti baru-baru ini membuat suplai negara itu menjadi berkurang.

Akar wangi termasuk tanaman rumput menahun, yang membentuk rumpun yang besar, padat, dengan arah tumbuh tegak lurus, dan kompak. Akarnya bercabang-cabang, memiliki rimpang, dengan sistem akar serabut yang dalam, serta beraroma harum. Dari situlah asal-mula nama akar wangi muncul. Rumpunnya bisa tumbuh hingga ketinggian 1-3 meter, dengan diameter 2-8 mm. Sedangkan daunnya berbentuk garis, pipih, kaku, dengan permukaan bawah daun licin. Perbungaan malai (tandan majemuk) terminal. Setiap tandan memiliki panjang sekitar 10 cm. Ruas yang terbentuk antara tandan dan tangkai bunga berbentuk benang, tetapi di bagian apeksnya tampak menebal.

Dalam membudidayakan akar wangi tidaklah memerlukan perawatan

yang rumit. Cukup menanam bibitnya lalu disiram dan diawasi sampai tumbuh tunas. Setelah itu, ia akan tumbuh subur dan mampu bertahan dalam waktu lama. Kalau dibiarkan tanaman ini bisa hidup selama 50 tahun, panjang akarnya bisa mencapai 15 meter secara vertikal ke bawah tanah, sehingga menjadi paku bumi yang amat murah untuk menahan pengikisan tanah.

Manfaat tanaman akar wangi cukup banyak, sehingga layak dibudidayakan dan dijadikan salah satu komoditas pertanian unggulan. Akar wangi yang sudah dikeringkan bisa dijadikan bahan baku aneka kerajinan. Misalnya tas, taplak meja, tatakan gelas, ikat pinggang, dompet, sepatu atau sandal, penutup lampu, tikar, boneka, hingga gorden.

Selain bisa menjadi hiasan, aroma harum yang dikeluarkan akar wangi dipercaya bisa mengusir rayap. Oleh karena itu para ahli botani mengelompokkan akar wangi sebagai tumbuhan biopestisida. Artinya bisa menjadi pembasmi hama serangga secara alami. Jika ditanam secara tumpang sari dengan tumbuhan lain, maka serangga tak berani mengganggu.

Kabupaten Garut

Menurut buku *The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils* yang ditulis oleh Julia Lawless (Element Books, 1995), menyebutkan wilayah Kabupaten Garut merupakan wilayah yang sangat ideal untuk tanaman akar wangi. Karena lapisan tanahnya yang sering terlapisi oleh debu vulkanik atau tanahnya dekat dengan wilayah vulkanik.

Oleh karena itu pula, melihat potensi akar wangi yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Garut, pemerintah daerah setempat memberi perhatian khusus. Bentuk perhatian itu sejak tahun 1996 membuat Peraturan Daerah Pemkab Garut, yakni menetapkan adanya kawasan khusus budidaya akar wangi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini Kabupaten Garut memiliki lahan budidaya akar wangi terluas di Indonesia, lebih dari 2.400 hektare. Budidaya akar wangi yang dilakukan masyarakat Garut tersebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Samarang, Bayongbong, Cilawu, dan Leles.

Dari empat kecamatan itu, Kabupaten Garut mampu menghasilkan sekitar 20.000 ton akar wangi mentah, beserta hasil olahan berupa minyak akar wangi sebanyak 75 ton per tahun. Geliat usaha akar wangi di Kabupaten Garut itu, setidaknya mampu melibatkan 5.000 kepala keluarga, baik sebagai pemilik maupun petani penggarap. Jumlah itu belum termasuk mereka yang memilih jalur industri pembuatan minyak atsiri, kerajinan, dan perdagangan. ▲



Wanginya Bisnis Akar Wangi

Aroma wangi sedap dari akar wangi menjadi inspirasi tangan-tangan kreatif untuk menciptakan produk-produk kerajinan bernilai tinggi. Belakangan ini, di sejumlah daerah akar wangi menjadi tren media produk kerajinan tangan. Pasarnya pun tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga menjadi komoditi ekspor ke berbagai negara.

Sentra-sentra kerajinan berbahan akar wangi saat ini bisa ditemui di Garut, Jabar, Wonogiri dan Pekalongan, Jateng.

Seperti dikutip dari Surabaya Post, Warsito salah satu pengerajin akar wangi dari Wonogiri, menciptakan produk pohon natal dengan berbagai ukuran. Untuk sebuah pohon Natal setinggi 40 sentimeter atau setengah meter biasanya dibutuhkan dua hingga tiga kilogram akar wangi. Harga pohon natal akar wangi hasil kreasi Warsito bervariasi mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 500.000.

Lain pula dengan H. Imron Mina bin Kamsari, warga kampung Pakumpulan, Buaran di Pekalongan, Jateng, akar wangi dijadikan media tenun. Bahan baku akar wangi yang didatangkan dari Garut, setiap minggu dihasilkan tenun akar wangi sepanjang sekitar 1.000 meter dengan lebar 120 sentimeter. Dengan tenunan akar wangi itu, kemudian dikreasikan lagi menjadi berbagai produk kerajinan. Seperti alas piring makan, karpet, tirai, partisi dan sajadah.

Menurut Imron, dengan 1.000 meter tenunan akar wangi per minggu bisa dihasilkan tirai sebanyak 250 lembar, alas makan 400 lembar, dan sajadah

1.500 lembar. Produk sajadah yang dihasilkan Imron saat ini telah berhasil dipasarkan ke berbagai negara Timur Tengah, dan omsetnya bisa mencapai lebih dari Rp 2 miliar per bulan.

Lain pula dengan Joanna dari Zocha Graha Kriya, Garut, menciptakan berbagai berbagai produk suvenir. Usaha yang dirintis sejak tahun 1998, itu, antara lain menghasilkan taplak meja, tas, lampion, tudung saji, tutup kulkas, boneka, sarung bantal, hingga sekat ruangan.

Menurut Joanna, seluruh produk yang dihasilkan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu fashionable, fungsional, dan dekoratif. Dan, akar wangi yang baik untuk dijadikan kerajinan berusia 12 bulan, sebab panjangnya sudah mencapai 40 centimeter sehingga memadai untuk ditenun. Ukuran akar yang tidak sama besar justru menjadi kelebihan karena menjadikan tenunan bertekstur unik.

Untuk produk berupa boneka, kata Joana, Zocha Graha Kriya punya kreasi yang unik dan menarik. Bentuknya macam-macam, ada yang berbentuk kucing, mirip badak bercula, kodok, kurakura, bahkan bentuk naga.

Usaha yang dirintis Joana itu, kini sudah menjadi salah satu ciri khas kerajinan Kabupaten Garut. Sedangkan pasarnya, selain dipasok di dalam negeri juga diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia dan Timur Tengah. ▲

Akar wangi juga bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif. Seperti untuk menghilangkan bau mulut, gunakan akar wangi beberapa potong, daun sirih 2 lembar, pegagan 1 genggam, buah kapulaga 6 butir air 110 ml. Buatlah infus. Gunakan untuk berkumur, lakukan 2 kali sehari, setiap kumur 100 ml, bisa juga diencerkan dengan air hangat sebagian untuk ditelan.

Untuk menghilangkan rasa nyeri dari rematik, gunakan ambil akar wangi secukupnya, lalu gosokkan pada bagian yang sakit. Dan, tunggu beberapa saat, rasa neyeri itu akan hilang.



The Ministry of Trade; Maintain Food Security and Price Stabilization

In 2010, some of Indonesian food commodities were experiencing price increase, specially rice and paper commodity. It's caused by several factors, mainly by interference of production factor, the weather anomaly. On the other hand, the weather anomaly has made the food distribution traffic from production centre to consumer area worse. Anticipating the increasing of food commodity price, The Ministry of trade took some steps such as paying attention on food supply, price stabilization, and decreasing or balancing the impact of food factor price increase on low capital society.

In regards to this, The Ministry of Trade in 2010 has done the 13th Market Operation for people who too poor on some areas that needed it. The implementation of Market Operation was intensified base on the rice type consumed by local people. For example is the Market Operation for premium rice in Jakarta area. On the other hand, flexibility was given to Logistic Department of Indonesia to fulfill 1,5 million tons of rice supply via import and export supply.

Distribution Network and Market Empowerment

On the other hand, for the fluency of commodity flow and eliminating price derivatives, The Ministry of Trade's role is to develop National Logistic System which is combining transportation system & rural development in integration for creating a national connectivity. As per development vision, the national connectivity is Locally Integrated, Globally Connected, including local, national & global connectivity in intra island distribution traffic, amongst island, and international trade logistic.

According to this, The Ministry of Trade has reinforced national distribution network which is part of national logistic system. In addition, The Ministry of Trade also has done Traditional Market Revitalization, which is in the future will be developed as pilot markets, and developed food warehouse.

In 2010, The Ministry of Trade worked with local government has done physical & management revitalization for 128 tra-

ditional markets. Physical revitalization is done by building new market or renovating, and management revitalization is done by doing training and coaching for developer, trader, and also socialization on traditional market revitalization program to local authorized people and also a socialization on traditional market terminology or perception that needs to be changed to fresh, friendly and clean market.

On the other hand, in 2010 The Ministry of Trade also built 11 warehouses in 11 food production centre regencies. The food warehouse is equipped with Warehouse Receipt System which means that The Ministry of Trade gave thorough support and solution by preparing soft and hard equipment, building the primary commodity warehouse, building 35 Dryers for 35 warehouses that were built in 2009, socialization and Warehouse Receipt System training for related party and the training was done by Coftra.▲

Vice Minister of Trade, Mahendra Siregar;

Economic Indicator Improvement, Opportunity of Developing Futures Exchange

The improvement of Economic fundamental is an opportunity for Indonesia to develop Commodity Features Trading Industry. Especially Indonesian Gross Domestic Product per capita is reaching US\$ 3000. "Based on some countries' experiences, when GDP is reaching US\$ 3000 per capita, economic acceleration will be increasing. Therefore Future Exchange has to acknowledge this opportunity as an infrastructure that commodity based industry is needed to protect rate and prices reference" Mahendra Siregar explained.

Mahendra said that Government support is needed to promote Indonesian Futures Exchange, either on National or International level. "We, the Trade ministry, are recognizing that the exchange promotion that has been done was still inadequate. Therefore in the future all stakeholders will need to support each other." We can explore India's experience as one of developing countries, India is successful in developing the Future Exchange. Therefore, we invited The Managing Director

of Mumbai Commodity Exchange (MCX), Lamon Rutten to come & share the experiences. "In Less than 5 years, MCX is at the top 6 around the world with million lots a day. Hence we need to learn from India's experience" Mahendra said. "From our brief dialog with Lamon Rutten, he said that one of the keys of success of the Futures Exchange in India is the full support from government. This idea is a very priceless contribution for Indonesia." Mahendra Siregar explained.▲

House of Representatives of The Republic of Indonesia Amend 2 Regulations for Coftra

There are 2 regulations under Coftra, The Commodity Futures Trading regulations and Warehouse Receipt System Regulations that will be amended by the House of Representative of Republic of Indonesia. The House of Representative of Republic of Indonesia's political decision was launched on second plenary in 2010.

The amendment of Commodity Futures Trading and Warehouse Receipt System Regulations seems became end of year present for Future Exchange industry and Receipt System players. It could be said that the amendment of those regulations especially the Commodity Futures Trading regulation has been waited for years. As Regulation No.32 /1997 concerning Commodity Futures Trading has been indicated not up to date. As the result, our commodity Futures Trading Industry can't develop itself and compete with International exchange.

In addition, commodity futures trading can't bring positive impact for actual sector development.

The chairman of The House of Representatives of The Republic of Indonesia plenary, Pramono Agung said, after listening to factions' general overview, it was decided that The House of Representative of The Republic of Indonesia will amend regulation No.32/1997 concerning Commodity Futures Trading and regulation No 9/2006 concerning Warehouse

Receipt System. Furthermore, the amendment of those 2 regulations became The House of Representative of The Republic of Indonesia initiative right. Meanwhile, vice president of The House of Representative of The Republic of Indonesia 4th Commission, Aria Bima, after the plenary said, after the plenary the next step is submitting a letter to President. The point is to advise and ask government to participate in those regulations' discussion. "If President gives a quick response, in the next assembly period we will have a discussion about it." "The target from the 4th commission is that we will finish the regulation in one assembly period. Thus on the next plenary, approximately in February 2011 those regulations can be validated by government." Aria Bima explained.

The same thing also said by Coftra's chief, Deddy Saleh, "We will gladly accept the completion of those two regulations as The House of Representatives of The Republic of Indonesia's initiative". Then, Deddy added, we will wait for President's assignment letter for Minister of trade to be government representatives on the next discussion.

Furthermore Deddy Saleh said, "We will review the content of regulations draft that will be discussed, whether it's applicable for industry & government need or not. Therefore, we will arrange list of problem inventory that will be used as discussion material for government and The House of Representatives of The Republic of Indonesia."

It's different.

In regards to regulation No. 9/2006 concerning the Warehouse Receipt System that suggest the establishment of Guarantee Fund Corporation, young politician from PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, delivered his opinion on plenary. Maruarar Sirait said, "The establishment of Guarantee Fund Corporation for Warehouse Receipt System is not needed as it can be combined with the same organization in banking – the Deposit Insurance Corporation. Too many corporations were established but they didn't run effectively, it's not as expected."

When this statement was confirmed to Aria Bima, He firmly said that the Warehouse Receipt Guarantee Fund Corporation is very different with the Deposit Insurance Corporation. "From what it's called, the differentiation is so obvious, they are insuring customer's money deposit and we are insuring farmers' commodity. So it can't be combined."

"On the other hand, it will be impossible if the Deposit Insurance Corporation people want to deal with guaranteed commodity because the corporation will not only insuring but they have to be ready to find the final buyer players for the guaranteed commodity" Aria Bima explained. ▲



Lebih Jauh Tentang The Egyptian Exchange

Kunjungan pejabat dan staf Bappebti, di Cairo, Egypt, pada 8 - 9 November 2010, lalu, dalam rangka pertemuan tahunan International Organization of Securities Commission (IOSCO) dan International Forum for Investor Education (IFEI), juga disempatkan untuk mengunjungi The Egyptian Exchange. Dari kunjungan ke bursa Egypt itu, didapatkan sejumlah informasi penting tentang perkembangan bursa tertua di Timur Tengah itu. Diah Sandita Arisanti, Kasubag Kerjasama, Bappebti, menyarikan informasi dari kunjungan ke The Egyptian Exchange, sebagai berikut.

Terbentuknya The Egyptian Exchange (EGX) diawali dengan berdirinya bursa berjangka Alexandria pada tahun 1885 di Alexandria's Café de l'Europe di Place des Konsul yang kemudian berganti nama menjadi Mohammed Ali Square. Bursa Alexandria merupakan salah satu bursa tua di dunia. Transaksi perdana dimulai pada tahun 1885, yakni dengan memperdagangkan kontrak berjangka kapas.

Kontrak berjangka kapas yang terbaru disahkan pada tahun 1909, bertepatan dengan pemulihan Mesir dari kemerosotan ekonomi akibat krisis keuangan tahun 1907. Sejauh ini, intervensi pemerintah terhadap bursa sudah praktis tidak ada. Di sisi lain, pasar spot kapas Minet al-Bassal sudah ditinggalkan pada 1931. Dari sebanyak 35 perusahaan pialang terdaftar yang bertransaksi kapas pada tahun 1950, hanya dua yang berasal Mesir. Selebihnya merupakan pialang asing. Demikian juga, para direktur bursa Alexandria adalah campuran yang tidak merata dari Mesir, kawasan Mediterania Timur dan Yahudi.

Kemudian pada 1903, diikuti dengan berdirinya bursa Cairo yang mendirikan Cairo Stock Exchange. The Egyptian Exchange memiliki dua lokasi yaitu di Kota Cairo dan Kota Alexandria. Meski berada di dua kota, The Egyptian Exchange dikelola oleh Ketua dan Anggota Dewan Direksi yang sama. Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Perdana Menteri, sedangkan Direksi dipilih oleh para pelaku pasar, perwakilan Central Bank of Egypt (CBE) dan Custodian Bank. Selain itu, dua wakil perusahaan yang terdaftar di Bursa Mesir adalah terpilih, asalkan salah satunya mewakili perusahaan menengah dan kecil.

EGX memiliki seperangkat aturan keanggotaan baik keanggotaan lokal maupun keanggotaan dari asing dalam mengakses pasar. Hal itu untuk memastikan integritas keuangan, etika bisnis, profesionalisme, solvabilitas serta persyaratan modal minimum. Hanya anggota resmi Egyptian Financial Supervisory

Authority (EFSA) yang dapat menjadi anggota EGX. Keanggotaan EGX diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Anggota executing, clearing dan settling
2. Anggota executing, clearing dan settling melalui custodians
3. Anggota executing, clearing dan melakukan kegiatan khusus (specialized activities)
4. Primary Dealers
5. Custodians
6. Market Makers.

Produk yang diperdagangkan The Egyptian Exchange saat ini adalah produk-produk saham seperti Stock, Bonds, Funds, Egyptian Depository Receipts (GDRs), dan Index EGX 30 Index, EGX 70 Index, EGX 100 Index dan Dow Jones EGX Egypt Titans 20 Index.

The Egyptian Exchange beroperasi melalui dua lokasi; trading floor utama yang ada di Cairo dan Trading platform tambahan yang ada di Alexandria. Keduanya menggunakan sistem dan aturan perdagangan yang sama.

Jam Perdagangan EGX mulai hari minggu sampai dengan Kamis dengan rincian sebagai berikut :

Over-the-Counter Market (Deals Market)	09:45 am – 02.00 pm
Over-the-Counter Market (OrdersMarket)	12:00 pm – 01:00 pm
Pre-Opening Session	09:45 am – 10:15 am
Listed Securities Mmarket (on the Exchange)	10:30 am – 02:30 pm
Primary Dealer System	10.30 am – 02.30 pm

Untuk memudahkan prosedur perdagangan bagi investor, EGX memperkenalkan online trading kepada pasar pada bulan Mei 2006, dimana investor dapat menempatkan order beli/jual mereka melalui Internet, yang kemudian di kirim ke Trading System melalui gateway broker masing-masing klien.

Aturan yang terkait dengan perdagangan produk-produk over the counter (OTC), EGX membagi tempat perdagangan yang tidak terdaftar (di luar Bursa) menjadi dua : Order Market dan Deals Market. Order Market diperuntukkan bagi perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari EGX untuk melakukan perdagangan. Deals Market merupakan pasar di mana EGX mengumumkan semua informasi tentang kesepakatan yang diatur (pre-arranged deals) setelah eksekusi mereka.

Untuk Clearing and settlement dilakukan oleh Perusahaan swasta yaitu Misa for Central Clearing, Depository & Registry (MCDR).

Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh Egyptian Financial Supervisory Authority- EFSA dan EGX yang memantau dan mendeteksi segala aktifitas yang dapat memanipulasi pasar. EGX bertanggungjawab dalam pengawasan on -line dan EFSA untuk pengawasan off-line. Kedua pimpinan dari EFSA atau EGX memiliki wewenang untuk menanggukhan penawaran (offer) dan Permintaan (bid) yang dianggap mencurigakan.

Saat ini, ada sebanyak 149 perusahaan anggota EGX yang beroperasi. Dari sebanyak itu, ada sekitar 30 perusahaan yang berkontribusi sebesar 80 persen dari nilai perdagangan tahun 2009, yang mencapai lebih dari 12 juta lot.

Dalam rangka pendidikan investor dan kampanye kesadaran masyarakat, EGX membuat suatu forum yang dinamakan 'Borsa Step X Step'(BSXS). Dalam melakukan kegiatan pendidikan dan kampanye, BSXS mengelompokan masyarakat menjadi kelompok mahasiswa, perusahaan besar, investor individu dan masyarakat umum.

BSXS terus memperluas programnya, dengan melakukan seminar gratis bagi publik untuk meningkatkan kesadaran investasi masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan terhadap mahasiswa di sejumlah universitas dan institusi. Sementara itu, secara paralel diterbitkan berbagai brosur pendidikan. Saat ini pun BSXS mengembangkan website dengan fitur-fitur baru yang menyajikan berbagai sarana pendidikan yang baru serta pelayanan publik. ▲



SRG Solusi Petani

Noviarina Purnama Putri, Staf Bappebti

Sistem Resi Gudang (SRG) mulai dikenal di Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Sebelum muncul Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, tentang, Sistem Resi Gudang, banyak dikenal berbagai macam terobosan yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditi pertanian. Beberapa diantaranya yang hampir mirip dengan SRG adalah sistem tunda jual, gadai gabah, dan yang terakhir adalah Collateral Management Agreement (CMA).

Jika ditinjau dari kelengkapan infrastruktur sistem dan keamanannya, SRG merupakan sistem yang paling aman dan canggih dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia. Dalam SRG terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas (BAPPEBTI). Serta, terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dari KAN dan disetujui oleh BAPPEBTI.

Seperti layaknya bayi yang baru lahir, dalam implementasinya di lapangan SRG mengalami berbagai macam kendala dan masalah. Yang menjadi masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan pihak lembaga keuangan terhadap mekanisme dan manfaat SRG. Hal ini merupakan kendala yang pada umumnya dialami oleh suatu kebijakan yang bersifat topdown.

Untuk meyakinkan masyarakat akan kredibilitas dan manfaat dari SRG mari kita tengok perkembangan SRG di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, berikut ini;

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa implementasi SRG tidak semulus yang dibayangkan dan mengalami fluktuasi baik itu jumlah resi gudang, volume komoditi, nilai barang maupun jumlah pembiayaannya. Tahun 2008 adalah tahun awal implementasi SRG, barang yang disimpan dan Resi Gudang yang diterbitkan sebagian besar masih merupakan percontohan bukan berdasarkan kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan nilai pembiayaan Resi Gudang pada tahun 2008 relatif kecil.

Kemudian pada tahun 2009 meskipun terdapat satu daerah baru percontohan yaitu di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, namun perkembangan nilai barang dan jumlah pembiayaan mengalami penurunan. Penurunan ini bukan semata-mata karena menurunnya minat pelaku usaha namun lebih karena manfaat

Tabel 1. Perkembangan Resi Gudang di Indonesia dari tahun ke tahun:

TAHUN	Resi Gudang		Volume		Komoditi		PEMBIAYAAN		Lembaga Keuangan
	Jumlah	% *)	(ton)	% *)	Nilai Barang (Rp 000)	% *)	Nilai (Rp 000)	% *)	
2008	16		508,83		1.431.616,2		313.900		BPRS Bina Amanah, BRI, Bank Jatim
2009	13	-19%	214,11	-58%	552.962,24	-61%	136.800	-44%	BRI
2010	56	331%	2.248,94	950%	8.467.083,5	1431%	4.017.986,3	2837%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, LPDB
TOTAL	85		2.971,88		10.451.661,94		4.468.686,3		

*) Prosentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya

dari SRG ini memang belum benar-benar dirasakan mengingat pada semester kedua 2008 dan awal tahun 2009 harga komoditi terutama jagung dan gabah relatif lebih stabil.

Di samping itu, kendala yang nyata terasa dirasakan adalah minimnya infrastruktur yang memenuhi persyaratan serta kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi SRG peran pemerintah daerah tidak kalah besar dengan peran pemerintah pusat terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah.

Dukungan Pemerintah

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga SRG melakukan beberapa stimulan untuk menggerakkan sistem ini. Pada Tahun 2009, melalui dana stimulus fiskal Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan gudang SRG di 34 daerah kabupaten yang tersebar di 10 propinsi di Indonesia.

Di samping itu, secara paralel dilakukan pula pendekatan dengan pihak perbankan dan bersama dengan Kementerian Keuangan pada akhir 2009 terbitlah peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2009, tentang Skema Subsidi Resi Gudang, yang mengatur tentang pemberian subsidi bunga kepada petani, kelompok tani, Gapoktan dan koperasi tani untuk kredit yang menggunakan Resi Gudang sebagai agunannya. Secara Teknis operasional di lapangan Pertauran Menteri Keuangan tersebut didampingi dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 66/M-DA/G/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan

Skema Subsidi Resi Gudang.

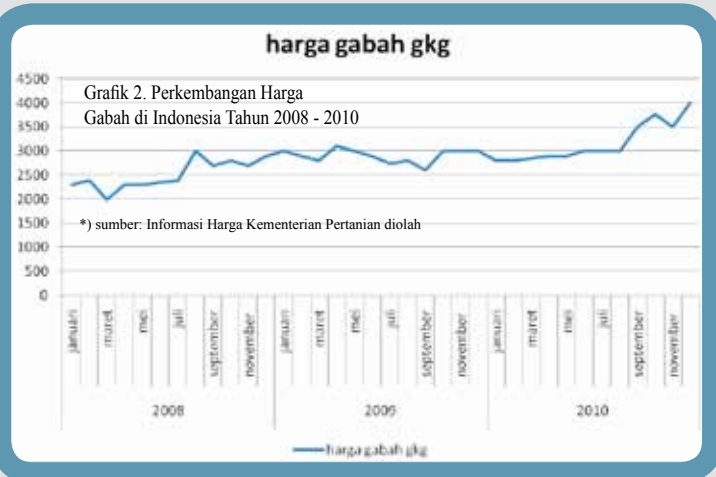
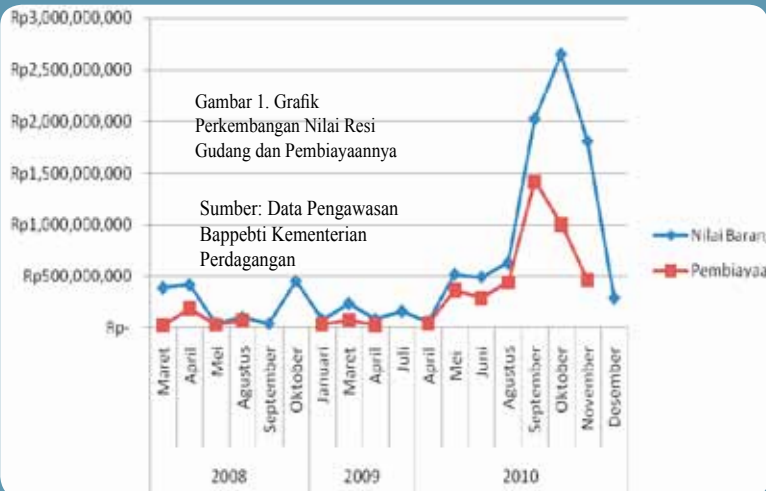
Beberapa stimulan yang diupayakan yang disebutkan di atas, terbukti mampu meningkatkan minat pelaku usaha terutama petani, kelompok tani, Gapoktan dan koperasi tani untuk memanfaatkan SRG. Hal ini dapat dibuktikan dengan meluasnya daerah implementasi SRG yang diikuti dengan peningkatan jumlah Resi Gudang yang diterbitkan, volume komoditi, nilai barang dan jumlah pembiayaan Resi Gudang pada tahun 2010 yang cukup tajam.

Jika pada tahun 2008 daerah implementasi SRG masih terbatas pada daerah percontohan saja yaitu Banyumas, Indramayu, Gowa, Jombang yang kemudian pada tahun 2009 menurun menjadi 3 daerah saja yaitu Karanganyar, Indramayu dan Gowa, maka pada tahun 2010 implementasi SRG mulai berkembang di Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang dan Barito Kuala.

Dan pada tahun 2011 mendatang, diperkirakan beberapa daerah yang telah mendapat pembangunan gudang SRG juga akan mulai mengimplementasikan SRG mengikuti Kabupaten Barito Kuala dan Subang, yang sudah lebih dulu memanfaatkannya. Daerah-daerah tersebut antara lain, Demak, Jepara, Kudus, Madiun, Bantaeng, Cianjur, Bantul, Ngawi dan Pidie Jaya.

Meskipun jumlah daerah dan nilai Resi Gudang terus berkembang, namun jika dilihat dari jenis komoditi yang diterbitkan Resi Gudang-nya masih terbatas pada komoditi pangan seperti jagung dan gabah. Bahkan pada tahun 2010, semua Resi Gudang yang terbit adalah untuk komoditi gabah dengan berbagai varietas mulai dari IR 64, Ciherang, maupun beras ketan.

Perkembangan nilai barang dan jumlah pembiayaan secara bulanan dapat dilihat pada grafik 1.



Dari grafik tersebut dapat dilihat dengan jelas fluktuasi perkembangan nilai barang yang direalisasikan setiap bulannya. Jika ditinjau dari jenis komoditi yang direalisasikan yaitu gabah maka hal ini tidak akan tampak mengejutkan karena gabah adalah komoditi pertanian yang bersifat musiman. Panen gabah dilakukan tiap 3-4 bulan sekali dan ada masa panen raya dan paceklik. Ada satu yang menarik disini yaitu pada tahun 2008 dan 2010 nilai barang tertinggi yang di Resi Gudang-kan terdapat pada bulan April - Mei dan September - Oktober. Untuk lebih jelasnya lagi mari kita lihat perkembangan harga gabah pada tahun 2008 - 2010, berikut ini:

Berdasarkan grafik perkembangan harga tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pola yang hampir serupa dalam fluktuasi harga gabah bulanan sepanjang tahun. Menjelang akhir tahun harga gabah selalu melonjak naik sementara harga gabah terendah terjadi pada bulan-bulan Maret - Mei, yang kemudian secara perlahan naik dan pada bulan September - Oktober akan kembali mengalami penurunan yang akhirnya diikuti kenaikan cukup tajam menjelang akhir tahun.

Jika dibandingkan dengan perkembangan nilai barang yang direalisasikan, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara perkembangan harga gabah dengan nilai barang yang direalisasikan. Pada saat harga turun minat pemilik barang untuk menyimpan barang akan meningkat dan pada saat harga beranjak naik maka minat untuk menyimpan barang semakin menurun.

Dari kedua grafik tersebut, dapat pula dilihat bahwa sebenarnya pemilik barang yang memanfaatkan Resi Gudang sudah cukup paham akan pergerakan harga komoditi gabah yang mereka miliki. Mereka cukup jeli melihat kondisi pasar sehingga tahu kapan harus menyimpan barang dan kapan harus menjualnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tipis kemungkinan pemilik barang mengalami risiko penurunan harga.

Perhitungan Keuntungan

Beberapa data perkembangan SRG yang disebutkan di atas tidak akan ada artinya apabila manfaat dari SRG tidak dapat dirasakan secara nyata oleh pemilik barang. Sekarang mari kita tengok lebih dalam tentang implementasi SRG di lapangan. Ambil satu contoh yang terbaru yaitu di Kabupaten Subang. KSU Annisa pada bulan Oktober 2010 menyimpan gabah sebanyak 60 ton gabah ketan. Pada saat itu harga gabah ketan tersebut adalah Rp. 5.000/kg. Biaya penyimpanan yang dibayarkan kepada PT. Pertanian selaku Pengelola Gudang di kabupaten Subang adalah sebesar Rp. 4.500.000,-. Pada bulan, Desember 2010 gabah ketan yang disimpan dibeli dengan harga Rp. 5.900/kg dalam selang waktu 2 bulan saja, KSU Annisa dapat memperoleh selisih harga sebesar Rp. 900/kg maka perhitungan keuntungannya adalah sebagai berikut:

Jika dijual langsung:
 $60.000 \times \text{Rp } 5.000/\text{kg} = \text{Rp } 300.000.000,-$

Dengan disimpan 2 bulan:

Biaya Penyimpanan
 Rp 4.500.000,-

Bunya Bank
 $6\% \times 2/12 \times \text{Rp } 189.000.000 = \text{Rp } 1.890.000,-$

Harga Jual setelah disimpan 2 bulan =
 $60.000 \times \text{Rp } 5.900/\text{kg} = \text{Rp } 354.000.000,-$

Keuntungan = (harga jual setelah disimpan) - (pendapatan jika dijual langsung + biaya penyimpanan + biaya bunga)
 $= \text{Rp } 354.000.000 - (\text{Rp } 300.000.000 + \text{Rp } 4.500.000 + \text{Rp } 1.890.000)$
 $= \text{Rp } 354.000.000 - \text{Rp } 306.390.000$
 $= \text{Rp } 47.610.000$

Contoh tersebut hanyalah satu dari beberapa cerita sukses

implementasi SRG yang ada, manfaatnya nyata juga telah dirasakan terlebih dahulu oleh Kelompok Tani Wargotani yang ada di Banyuwangi, Gapoktan Jaya Tani di Indramayu, dan bahkan Koperasi Celebes Mandiri di Sidrap Sulawesi Selatan.

Implikasi SRG yang menyebar ke seluruh bidang sektor mulai dari hulu sampai hilir (pertanian- industri) akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian baik daerah maupun nasional. Dampak yang nyata dapat dirasakan adalah adanya peningkatan pendapatan petani, tumbuhnya industri pergudangan di daerah, berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan, yang akhirnya secara makro akan meningkatkan distribusi pendapatan daerah.

Di samping itu, implementasi SRG juga akan memberikan dampak yang tidak kentara (intangible) berupa tumbuhnya pola kemandirian usaha dan entrepreneurship pada petani dan pelaku usaha, hilangnya budaya paradigma lama atas penerimaan akan kemajuan teknologi dan peningkatan interaksi petani lokal dengan dunia maya (Internet) dalam memperoleh informasi.

Jika dilihat dari keuntungan yang dirasakan baik secara tangible maupun intangible, maka sudah seharusnya untuk masa-masa mendatang SRG bisa menjadi solusi bagi semua pemilik komoditi. Untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang disimpan di gudang dengan tanpa kehilangan hak kepemilikannya meskipun harga belum sesuai dengan harapan.

Kesuksesan Implementasi SRG untuk saat ini dapat terjadi karena adanya komitmen yang kuat dari setiap unsur kelembagaan SRG serta dukungan yang tidak ada henti-hentinya dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Untuk mewujudkan implementasi SRG yang sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, merupakan pekerjaan besar bagi semua pihak dan merubah pola kebiasaan yang ada di masyarakat tidaklah semudah membalikan tangan. ▲



Deddy Saleh Angkat Citra PBK

Berhasil menekan tindakan malpraktik, citra perdagangan berjangka komoditi Indonesia terangkat. Pelaku asing pun masuk ramaikan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Cita-citanya cuma satu hadirkan price reference komoditi di Indonesia.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tidak boleh kompromi dengan pelaku usaha, melainkan harus tegas dalam menegakan peraturan. Sekali membuka peluang untuk kompromi, maka akan merusak integritas perdagangan berjangka komoditi. Indikator sukses Bappebti selaku otoritas perdagangan berjangka, setidaknya ditentukan dari sejauh mana bursa berjangka Indonesia diakui oleh pasar internasional.

Demikian antara lain diungkapkan mantan Kepala Bappebti, Deddy Saleh, saat serah-terima jabatan kepada Kepala Bappebti yang baru, Syahrul R Sempurnajaya, di Gedung Bappebti, 24 Januari 2011.

Dikatakan Deddy Saleh, 'tugas utama saya ketika akan diangkat sebagai Kepala Bappebti, Ibu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, memberi target penegakan hukum dan peraturan dari banyaknya kasus malpraktik perdagangan berjangka.'

"Dengan bantuan staf dan pejabat Bappebti lainnya, satu persatu masalah dapat kita selesaikan. Saya sungguh menyadari, masalah tidak dapat dihilangkan tetapi bisa ditekan. Karena, seketat apa pun peraturan, dunia usaha bisa saja mencari celah untuk melakukan praktik yang merugikan pihak lain," papar Deddy Saleh.

Misi yang diembankan kepada Deddy Saleh sebagai Kepala Bappebti untuk meningkatkan citra perdagangan berjangka komoditi, baik di tataran dalam negeri maupun dimata internasional, tampaknya cukup berhasil.

Selama dua tahun tujuh bulan memimpin Bappebti, setidaknya ada sebanyak tujuh perusahaan pialang berjangka yang izinnya dicabut aki-

bat melakukan praktik ilegal. Dengan tindakan tegas itu, pelaku pasar lainnya pun surut melanggar peraturan. Dan, diiringi dengan perangkat peraturan yang lebih ketat, jumlah pengaduan masyarakat yang dirugikan akibat transaksi ilegal semakin menurun pula.

Fenomenal

Tindakan tegas Deddy Saleh, nyata mengangkat citra perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Hal itu pun diikuti dengan kepercayaan pelaku pasar asing untuk melebarkan sayapnya di Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada dua pelaku pasar asing yang punya integritas di bidang perdagangan berjangka komoditi mendirikan perusahaan pialang berjangka di Indonesia.

Masuknya perusahaan pialang asing itu didasari dikeluarkannya kebijakan Deddy Saleh yang memberi peluang kepada pihak asing untuk mendirikan perusahaan pialang berjangka di Indonesia.

Catatan yang mungkin fenomenal bagi Deddy Saleh selama memimpin Bappebti yakni, berdirinya bursa berjangka dan lembaga kliring baru. Yakni, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT Identrus Securitis Internasional (ISI), pada 23 Juni 2009.

Berdirinya dua lembaga baru di bidang perdagangan berjangka itu, benar-benar diarahkan Deddy Saleh untuk menghadirkan pasar komoditi di Indonesia. Dengan langkah pasti, akhirnya BKDI mampu menciptakan price reference dari crude palm oil (CPO). Meski volume transaksi kontrak berjangka CPO belum bisa disetarakan dengan bursa sejenis dari luar negeri, setidaknya BKDI sudah

berhasil mensejajarkan harga CPO dengan pasar internasional.

Catatan menarik lainnya diujung kepemimpinan Deddy Saleh di Bappebti, menghantarkan dua undang-undang di bawah naungan Bappebti untuk diamandemen oleh DPR RI. Yakni, UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi dan UU No. 9/2006, tentang sistem resi gudang.

Tugas mengamandemen dua undang-undang sekaligus bukanlah hal yang mudah. Setidaknya diperlukan loby tingkat tinggi dan kerja keras. Beberapa saat sejak diangkat sebagai Kepala Bappebti pada tahun 2008, Deddy Saleh sudah mewacanakan untuk mengamandemen dua undang-undang tersebut. Dan, baru bisa terealisasi diakhir tahun 2010.

Diakhir menginjakkan kakinya di Bappebti, Deddy Saleh, juga menitipkan beberapa catatan penting kepada sang pengganti, Syahrul R Sempurnajaya. Diantaranya, peningkatan kemampuan SDM Bappebti dalam melakukan audit perdagangan berjangka komoditi.

"Kalau memang SDM audit belum bisa maksimal, harus dicarikan solusi seperti diserahkan kepada pihak konsultan. Audit transaksi perdagangan berjangka komoditi sangat vital. Karena hasil audit akan menentukan efektifnya penegakan peraturan dan fungsi kontrol dari pelaku pasar," jelas Deddy.

Di sisi lain, tambah Deddy Saleh, 'Pak Syahrul dan teman-teman di Bappebti sudah harus memikirkan nama pengganti dari Bappebti.'

"Sebab, jika dengan Bappebti hanya mengawasi perdagangan berjangka komoditi. Pada hal fungsi dan tugas lain yang juga cukup berat, yakni sistem resi gudang," imbuh Deddy Saleh. ▲